

HTH. 49/21
Ima
2.

STUDI MENGENAI RENCANA PEMEKARAN WILAYAH
KOTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOJONEGORO

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

O L E H

M. IMAM SOEWITO

NO.STB.7340

UNIVERSITAS AIRLANGGA, FAKULTAS HUKUM

SURABAYA

1981

STUDI MENGENAI RENCANA PEMEKARAN WILAYAH
KOTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOJONEGORO

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELAKUKAN TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

O L E H

M. IMAM SOEWITO

NO.STB.7340

PEMBIMBING PERTAMA

PEMBIMBING KEDUA

R. DJOKO SOEMADIJO, S.E.

NOCH. ROCHIM SJAIFAN, S.H.

UNIVERSITAS AIRLANGGA, FAKULTAS HUKUM

SURABAYA

1961

Saya tidak akan bertanya, apa yang telah diberikan Negara kepada saya, tetapi akan saya tanyakan apa yang dapat saya lakukan untuk Negara tercinta



Aku persembahkan kepada Bapak, Ibu - ku yang tercinta serta Isteriku, Anak-anakku dan seluruh Saudaraku yang tersayang

KATA PENGANTAR

Bismil laahir rahmaanir rahiin.

Dengan mengueap syukur alhandullillah kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada saya sehingga akhirnya tersusunlah skripsi yang amat sederhana ini guna memenuhi salah satu dari sekian banyak persyaratan yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam rangka menempai gelar Sarjana Hukum.

Di dalam kesempatan ini dengan disertai perasaan tulus yang sedalan-dalannya, saya ingin menyatakan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Terhormat :

1. bapak R. Djoko Soenadije, SH - Pembantu Dekan Urusan Pendidikan, sebagai Dosen Pembimbing Bidang Penulisan Hukum Tata Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang dengan tak jemu-jemu tanpa mengenal lelah memberikan bimbingan pengarah dan bantuan yang amat berharga kepada saya, sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini ;
2. bapak Lisman Iskandar, SH - Wakil Dosen Wali saya, yang telah memberikan nasehat serta dorongan semangat dan bantuan dalam mengantarkan saya kepintu keberhasilan penyelesaian studi ;
3. bapak Drs. Widarto - Kepala Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang dengan kelapangan

hati beliau memberikan fasilitas berkomunikasi antara saya dengan beliau beserta staf, dalam hubungannya dengan penyelesaian skripsi ini ;

4. bapak Haji Machmud Zain, SH - Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Bojonegoro, yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saya untuk menyelesaikan studi sekaligus memberikan pula bantuan yang amat bermanfaat berupa petunjuk dan saran serta pengumpulan data-data guna penyusunan skripsi ini ;
5. semua rekan-rekan saya dan semua pihak pribadi yang dengan ketulusannya turut serta menyumbangkan tenaga pikirannya sehingga bisa disusunnya skripsi ini.

Akhirnya pernyataan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada Bapak dan Ibuku tercinta, Isteriku dan Anak-anakku tersayang yang amat besar jasanya selaku motor penggerak yang tak pernah berhenti di dalam mendorong saya menuju keberhasilan disegala bidang.

Mudah-mudahan dengan skripsi yang masih sangat sederhana ini, akan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Bojonegoro. Saya menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, maka oleh karenanya dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya selalu mengharapkan kritik, saran dan petunjuk guna lebih sempurnanya.

Surabaya, Juli - 1980

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Alasan Pemilihan Judul.....	1
2. Pembatasan Masalah Pembahasan.....	5
3. Metode Yang Dipergunakan.....	6
4. Sistematika Pembahasan.....	8
II. TINJAUAN UMUM/LANDASAN TEORI.....	11
1. Dasar Hukum/ '.....	13
2. Azas Dasar Ilmu Lingkungan.....	14
III. PENINJAUAN TENTANG KEMUNGKINAN YANG ADA SEBAGAI FAKTOR PEMBANTU MENUJU KEBERHASILAN PEMEKARAN WILAYAH.....	19
1. Struktur Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Bojonegoro.....	21
2. Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Prosedur Pelaksanaan Dan Perwujudan Pemekaran Wilayah.....	28
3. Tata Cara Pelaksanaan Pemekaran.....	35
4. Usaha-usaha Yang Telah Dilakukan Di dalam Rencana Pemekaran Wilayah.....	39
IV. HUBUNGAN RENCANA PEMEKARAN WILAYAH DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	44
1. Pentingnya Koordinasi Antara Unsur-unsur Pelaksana Dengan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemekaran Wilayah.....	45
2. Sumber Keuangan Daerah Dalam Pembangunan Daerah.....	48
3. Hambatan-hambatan	51
V. PENUTUP	54
DAFTAR BACAAN	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	

B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Alasan Pemilihan Judul

Guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang berjalan lebih lancar, maka perlu adanya satu kesanggupan yang positif dari aparatnya mulai dari bawah sampai ke tingkat atas yang benar-benar mampu diterima bahkan didukung oleh rakyatnya. Demikian pula dengan apa yang saya sebut sebagai istilah "pemekaran wilayah - kota", nampak sekali telah menjadi suatu langgam yang sedang dibahas oleh beberapa kota besar dikawasan Indonesia Raya, yang tak menutup kemungkinan pula bagi kota atau daerah-daerah tingkat II yang bergagasan sama.

Tentu saja kesemua usaha tersebut akan menimbulkan akibat-akibat yang berupa berpuluh-puluh daerah pedesaan beserta penghuninya yang berada di seputar wilayah kota tersebut terserap masuk ke dalam kewenangan pemerintah kota yang bersangkutan.

Hal-hal tersebut apabila benar-benar kita mau meneliti secara seksama, maka masyarakat yang terkena pemekaran masih belum seirama dengan fenomena di atas, dengan perkataan lain bahwa studi atau penelitian tentang hal itu masih merupakan sesuatu hal yang langka di kawasan Indonesia Raya ini.

Oleh sebab itulah, maka saya sebagai seorang karya-

wan Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro yang pada saat ini berstatus staf sub. direktorat pembangunan, ingin sekali mengadakan studi masalah tersebut, dan yang menjadi obyek studi adalah masyarakat yang bersangkutan, peraturan perundangan yang dijadikan landasan pelaksanaannya serta para aparatnya sebagai unsur pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan studi penjelajahan dengan pendekatan sosio-historis terhadap masyarakat yang terkena pemekaran tersebut. Dan arah daripada penelitian adalah untuk melihat dan mengetahui langkah-langkah selanjutnya secara positif dalam rangka perencanaan pemekaran wilayah daerah Bojonegoro, di dalam menyebar ratakan kehidupan dan penghidupan warganya sesuai dengan pemurnian pelaksanaan program-program Pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan delapan jalur pemerataan.

Pada judul skripsi ini, saya mempergunakan istilah studi mengenai rencana, maksudnya adalah penelitian rencana pengetrapan terhadap peraturan yang dipergunakan untuk mengadakan pemekaran wilayah kota tersebut.

Di samping hal tersebut, untuk memperluas arti dari peraturan perundang-undangan terhadap pemekaran kota, khususnya pemekaran wilayah di daerah/desa (secara garis besar ataupun pokok-pokoknya saja) juga perlu

adanya suatu sistem yang mengatur tentang pelaksanaannya di dalam daerah yang bersangkutan, yang dibuat oleh daerah sesuai dengan situasi, kondisi secara mendetail sehingga apa yang menjadi tujuan dan idaman daripada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan dapat dicapai sesuai dengan yang dicita-citakan.

Kemudian untuk mencapai hasil yang maksimal efektif dan efisien, sangatlah diperlukan syarat mutlak untuk memahami dasar-dasar sistem / perundang-undangan peraturan yang berlaku, sebagai dasar pemekaran juga terhadap pelaksanaan dari sistem tersebut. Sebab, realisasi daripada semua kegiatan yang saya sebutkan di atas akan berpengaruh pada mekanisme pemerintahan di daerah khususnya terhadap rencana pemekaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, maka dengan tegas saya memilih judul skripsi ini " Studi Mengenai Rencana Pemekaran Wilayah Kota Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ", dengan alasan sebagai berikut :

- a. dengan skripsi yang masih sederhana ini saya ingin sekedar memberikan gambaran tentang pentingnya suatu daerah dalam wilayah kota itu dimekarkan dalam arti yang menyeluruh, baik artian mekar di bidang

batas-batas daerah maupun di bidang sosial-ekonomi, yang apabila di padukan diantara keduanya akan berarti pemekaran dalam bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat yang bersangkutan, yang lebih maju dan tinggi tingkatannya di dalam masa perkembangan pembangunan sekarang ini dan seterusnya, demikian juga pemekaran terhadap sistem atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan ;

- b. melalui skripsi yang sederhana ini pula, saya berharap agar masyarakat yang bersangkutan mau menerima kenyataan dengan penuh keterbukaan atau kesadaran, sehingga akan lebih mudah usaha Pemerintah Daerah beserta seluruh aparatnya untuk memperbaiki ataupun lebih meningkatkan keadaan kehidupan dan penghidupannya ;
- c. merupakan usaha memperkembangkan ilmu pemerintahan yang sekaligus menunjang berhasilnya ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. khususnya di bidang pembangunan regional, yang kesemuanya diharapkan akan menunjang pula berhasilnya dan suksesnya pembangunan nasional;
- d. sekedar sebagai sumbangsih pemikiran saya, yang memungkinkan bisa berguna bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro, sekaligus sebagai salah satu upaya guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

2. Pembatasan Masalah Pembahasan

Mengingat betapa luasnya ruang lingkup daripada masalah usaha pemekaran wilayah kota, yang merupakan bentuk perencanaan kota sebagai kebutuhan mualak bagi pertumbuhan kota yang sehat, maka dalam skripsi ini saya memberikan pembatasan masalah yang akan dibahas yang antara lain menyangkut :

- a. hal-hal yang berhubungan dengan sistem pemekaran wilayah (pembentukan kecamatan baru) di daerah tingkat II Bojonegoro, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan dan realisasi dari pemekaran wilayah yang bersangkutan ;
- c. segi struktur organisasi / administrasi pelaksana pemekaran wilayah kota / daerah ;
- d. hubungan pelaksanaan pemekaran wilayah kota/ daerah dengan pembangunan daerah / nasional, terutama yang berhubungan dengan sumber pembiayaannya ;
- e. hambatan-hambatan yang ada dan usaha pemecahannya ;
- f. saran-saran.

Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini saya hanya akan membahas hal-hal tersebut di atas saja, karena selain mengingat betapa luas ruang lingkungannya, juga mengingat waktu yang diberikan untuk menyusun skripsi ini.

3. Metode Yang Dipergunakan

Penyusunan skripsi ini didasarkan kepada cara penelitian guna mendapatkan data-data yang konkrit, yaitu mempergunakan :

- a. metode interview ;
- b. metode observasi ;
- c. metode dokumentasi ;
- d. metode library research.

Ad.a. Metode interview.

Metode ini adalah suatu cara yang saya pergunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yaitu dengan mengadakan wawancara langsung antara saya dan respondence. Ieran saya dalam hal ini sebagai information hunter (pencari informasi) maka dalam mendapatkan data, saya telah mempersiapkan pertanyaan yang jawabannya diharapkan langsung dari para pihak (respondence) sebagai pemberi informasi (information supplier), dan dari jawaban tersebut saya mencatatnya serta sekaligus berusaha mengingatkannya.

Dalam mempergunakan metode ini, untuk mencapai sasaran pokok dalam menggali sumber data, maka saya secara bebas tetapi terpimpin mengajukan pertanyaan yang langsung berhubungan dengan hypotesa penyelidikan saya dengan selera dan situasi yang ada.

Ad.b. Metode observasi.

Metode ini adalah metode pengumpulan data dan informasi kepada respondents dengan cara langsung meneliti serta mengamati kegiatan obyek penelitian, kemudian membuat catatan yang disusun secara sistematis. Perlu saya sebutkan, bahwa dalam mengamati obyek penelitian saya hanya sempat meneliti sebagian saja sesuai dengan batas perumusan problematik / tujuan yang telah digariskan di atas.

Beberapa catatan yang saya gunakan :

- catatan mengenai beberapa masalah/peristiwa yang terjadi pada saat itu, dan saya tulis pada lembaran kertas buram ;
- catatan berkala yaitu catatan yang saya buat pada saat tertentu saja ;
- catatan observasi yang berhubungan dengan apa yang diteliti terhadap seseorang atau beberapa orang (check-list).

Ad.c. Metode dokumentasi.

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan meneliti dokumen yang ada, kemudian saya kumpulkan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

4. Sistematika Pembahasan

Maksud saya membuat sistematika pembahasan ini adalah hanya mempermudah di dalam memberikan gambaran yang nyata kepada kita tentang pembahasan isi yang terdapat dalam penulisan ini, dan akan memberikan gambaran tersebut dari bab demi bab, sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bagian ini, saya memberikan gambaran tentang isi keseluruhan dari skripsi, kemudian memberikan uraian singkat tentang pemilihan judul, lalu mengadakan pembatasan terhadap pokok-pokok masalah yang akan dibahas serta menguraikan metode-metode yang dipergunakan untuk mendapatkan data, dan akhirnya menjelaskan sistematika pembahasan yang menyangkut teknis di dalam membahas pokok-pokok problema secara terperinci.

b. Bab II Tinjauan Umum / landasan teori.

Pada bagian ini, saya membahas tentang pengertian pemekaran wilayah secara umum, kemudian landasan teori atau dasar-dasar hukum yang diberlakukan, yang merupakan peraturan pelaksanaan pemekaran tersebut. Dan untuk lebih mantapnya, saya uraikan pula tentang azas dasar ilmu lingkungan sebagai pelengkap menuju berhasilnya pemekaran wilayah yang dimaksud.

c. Bab III Peninjauan tentang kemungkinan yang ada sebagai faktor pembantu menuju keberhasilan *

rencana pemekaran wilayah kota.

Di dalam bagian ini, saya menitik beratkan pokok persoalan pemecahan pada hal-hal atau faktor-faktor yang ada, yang mempunyai hubungan erat dengan rencana pemekaran wilayah kota.

d. Bab IV Hubungan rencana pemekaran wilayah kota dengan pembangunan nasional.

Di dalam bab ini, saya menguraikan bagaimana dan apa hubungan rencana pemekaran wilayah kota dengan pembangunan nasional dewasa ini. Di sini saya kemukakan betapa penting suatu daerah itu dimekarkan mengingat telah dipenuhinya syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan public-utilities lainnya. Terciptanya hubungan timbal balik antara para aparat pemerintahan dengan masyarakat awam mutlak amat diperlukan, terutama harus terjadi dalam arena pemekaran wilayah tersebut. Adapun mengenai master-plan untuk Daerah Tingkat II Bojonegoro hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian sehingga di dalam uraian saya nanti hanya dari segi materinya saja. Masalah pembiayaan, dalam bab ini sengaja saya sajikan hanya pos-pos penerimaan dan pengeluaran dari A.P.B.D. Tingkat II Bojonegoro, sebagai salah satu unsur penunjang yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan di daerah.

e. Bab V Penutup.

(1). Kesimpulan.

Di dalam bab ini, saya menguraikan kesimpulan terhadap semua masalah dan persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro dalam rangka persiapan/rencana pemekaran wilayah kota/daerahnya terutama pemekaran wilayah daerah kecamatannya di dalam usaha meningkatkan pemerataan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya yang selaras, seimbang dan serasi.

(2). Saran-saran.

Di sini saya sajikan saran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan bekal kemampuan, yang mungkin kelak akan berguna bagi usaha pemekaran wilayah kota / daerah dimaksud.

B A B II

TINJAUAN UMUM/ LANDASAN TEORI

Seperti telah saya uraikan dalam bagian pendahuluan bahwa arah dari penelitian masyarakat yang terkena pemekaran adalah untuk melihat dan mengetahui langkah-langkah selanjutnya secara positif di dalam rangka perencanaan pemekaran wilayah kota / daerah di Daerah Tingkat II Bojonegoro, juga yang utama pada akhirnya nanti adalah untuk melihat dan mengetahui perubahan sistem mata pencaharian penduduk pedesaan.

Pengertian pemekaran kota, di artikan sebagai sebuah kota yang berkembang secara sehat, bila di dalam kota itu terdapat ciri berlakunya dinamika ke seimbangan berbagai fenomena. Demikian pula halnya dengan pengertian pemekaran pedesaan atau wilayah kecamatan, di artikan sebagai desa atau wilayah kecamatan yang sehat, mempunyai proporsi yang menguntungkan jumlah orang / penduduk sekitarnya. Sebaliknya ke tidak seimbangan yang menyolok pada proporsi keadaan penduduk yang bersangkutan, menunjukkan gejala yang amat buruk sedang mengancam desa atau wilayah kecamatan tersebut.

Pemenuhan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta public utilities lainnya, dan berdasarkan pada pengamatan-pengamatan yang telah dilakukan sehingga pada

kenyataannya memang kecamatan lama terlalu luas dan jumlah penduduknya terlalu besar, maka pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro memandang perlu segera membentuk kecamatan baru yang mampu memberikan pelayanan, pembinaan, pengarahan, pengawasan kepada masyarakatnya secara efektif dan efisien yang semula sungguh tidak terjangkau oleh kecamatan lama.

Suatu hal yang harus dipahami dalam semua kegiatan usaha pemekaran ini, adalah : bahwa pembentukan kecamatan baru tersebut atas dasar tuntutan kebutuhan untuk peningkatan daya-guna dan hasil-guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Maka sesuai dengan prinsip dasar tersebut pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro mengajukan usul kepada pemerintah atasannya dengan melampirkan kelengkapan data-datanya. Kelengkapan data-data yang dimaksud meliputi :

- a. penjelasan urgensi pembentukannya ;
- b. desa-desa yang masuk dalam wilayah kecamatan baru ;
- c. desa tempat kedudukan ibu kota kecamatan baru ;
- d. jumlah penduduk dan mata pencahariannya ;
- e. jumlah pegawai, prasarana/sarana pemerintahannya ;
- f. instansi vertikal dan dinas-dinas yang telah ada ;
- g. fasilitas umum (public utilities) yang tersedia ;
- h. peta wilayah kecamatan induk (lama) termasuk kecamatan yang akan dibentuk, desa-desa dengan batas batanya yang jelas dan jaringan jalan yang ada.¹

1. Dasar Hukum

Di samping adanya kelengkapan data-data untuk pemenuhan syarat-syarat pengusulan pembentukan wilayah kecamatan baru (kecamatan Temayang), maka pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro amatlah perlu memberikan dasar bahwa semua kegiatan yang akan dilaksanakan tak terlepas daripada dasar hukum yang mengaturnya disepanjang undang-undang yang bersangkutan masih sah berlaku di Negara Republik Indonesia ini.

Maka secara kronologis, saya memaparkan dasar hukum dari rencana kegiatan pemekaran suatu wilayah daerah, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 18 ;
- b. Tap.MPR-RI Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
- c. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 Lembaran Negara nomor 38 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- d. Undang-undang nomor 32 tahun 1956, Lembaran Negara nomor 77 tahun 1956 juncto pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 ;
- e. Sistem administrasi manunggal di bawah satu atap, diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menhankam/ Pangab, Menkeu dan Mendagri nomor Pol.13/VII/1976, nomor Kep.1693/MK/IV/12/1976, nomor 311 tahun 1976 serta surat edaran Mendagri nomor 16 tahun 1977 ;

- f. Pidato pengarahan Dirjen Puod pada rapat kerja Kepala Biro Pemerintahan se Indonesia, pada tanggal 18 Desember 1979 di Ujung Pandang ;
- g. Laporan akhir penelitian pembinaan aparatur pemerintah wilayah kecamatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri 1977.

Dari dasar hukum yang saya uraikan di atas dapat dibuat suatu peraturan pelaksanaan pemekaran wilayah kota/ daerah yaitu sejak Pemerintah melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1974.

2. Azas Dasar Ilmu Lingkungan

Di dalam melaksanakan rencana pemekaran wilayah kota/ daerah oleh Pemerintah Pusat, khususnya Pemerintah Daerah selain harus berpedoman pada dasar hukum atau peraturan perundangan yang sah berlaku, dan agar di dalam praktek pelaksanaannya dapat mengarah pada sasarnya dengan tepat dan baik, maka menurut pemikiran saya faktor lingkungan hidup dari masyarakat yang terkena pemekaran perlu sekali mendapat perhatian khusus, baik dalam rangka pengenalannya, pengarahan dan pembinaan maupun pelestariannya. Hal ini dapat saya utarakan mengingat hasil survey yang sempat saya catat di daerah sasaran, yang ternyata menurut ukuran faktor lingkungannya masih amat memprihatinkan.

Kesadaran masyarakat yang daerahnya dimekarkan terhadap fungsi lingkungan hidup akan merupakan faktor penentu pula bagi berhasil dan tidaknya suatu wilayah yang dimekarkan, karena sebagai konsekuensi prinsip pemekaran mengharuskan daerah yang baru tersebut mampu menunjukkan wajah lingkungan hidupnya yang lebih baik dan lebih sehat daripada keadaan dan kondisi lingkungan sebelumnya. Dilain pihak pemerintah daerah berusaha meneliti secara cermat situasi apa yang sebenarnya mempengaruhi, sehingga masih dirasakan adanya kondisi lingkungan yang tidak bisa berkembang dengan baik.

Kondisi ekonomi yang belum baik dan pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan kondisi lingkungan hidupnya tidak bisa berkembang dengan baik, maka oleh karena itu saya menganggap bahwa masalah pendidikan lingkungan merupakan hal yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat. Dalam masalah ini menurut pengamatan saya, memang di dalam masyarakat sendiri sebenarnya telah ada pengertian "sadar lingkungan", hanya saja kurang diperhatikan dan dikembangkan.

Ada dua kriteria "sadar lingkungan" dalam masyarakat, yakni yang dimiliki oleh masyarakat awam dan yang dimiliki oleh masyarakat yang berpendidikan. Bagi yang awam (non pendidikan), masalah "sadar lingkungan" disebabkan karena keterpaksaan dan keterbelakangan terutama sebagai akibat dari faktor pendidikan yang belum/ tidak di

perolehnya sehingga hanya memiliki "sadar lingkungan" yang rendah. Maka di sini pendidikan non-formal terasa amat diperlukan karena merupakan suatu media penyebaran pengetahuan lingkungan yang baik, dalam jangka pendek mengingat tujuan dan sasarannya. Bagi orang atau masyarakat yang berpendidikan memiliki "sadar lingkungan" yang rendah, disebabkan karena kurangnya tanggung jawab sosialnya dan titik berat orientasinya pada keuntungan ekonomi belaka (contoh : para pengusaha yang membuang sampah perusahaannya se-enaknya, tanpa menghiraukan akibat yang mungkin ditimbulkan). Maka di sini pendidikan formal mutlak diperlukan baik pada tingkat pra universitas (SD, SMP, SLTA) maupun ditingkat akademi dalam jangka panjang, selain harus ada cara pendekatan sosial (motivasi).²

Saya sungguh merasa salut dan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro, yang dengan perhatiannya pada masalah perbaikan lingkungan hidup masyarakatnya telah menyelenggarakan suatu diskusi-panel pada tanggal 5 Juli 1980 dengan peserta tokoh-tokoh masyarakat, kepala-kepala dinas / instansi vertikal, wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Dari diskusi panel tersebut diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidupnya yang bukan sekedar menanamkan pengertiannya saja, tetapi terutama mem-

bangkitkan partisipasi rakyat untuk ikut memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan yang diperlukan adalah masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan hidup di samping menjaga lingkungannya sendiri secara langsung.

R.E. Soeriaatmadja dalam tulisannya yang berjudul "Lingkungan, Pengembangan Tatakota, Tatawilayah Dan Perencanaan Nasional", menyatakan :

banyak sekali timbulnya gejala-gejala yang harus dipertimbangkan sewaktu melakukan perencanaan, dan perencanaan pengembangan wilayah ternyata memiliki akibat ekologi.

Keserasian atau keharmonisan yang tumbuh sebagai akibat adanya perpaduan antara pelaksanaan pembuatan rencana dan rancangan pemekaran wilayah sesuai peraturan perundangan yang syah berlaku, dengan kesadaran masyarakat yang tumbuh dan terus berkembang akan lingkungannya, akan terciptalah suatu ketahanan nasional di daerah yang mantap

Dari pengertian-pengertian di atas, maka nampak jelas hubungan antara ilmu lingkungan dan pengembangan/-pemekaran wilayah semakin hari semakin nyata dan saling mempengaruhi. Adapun beberapa landasan hukum yang perlu dipelajari dan dilaksanakan yang berkaitan dengan masalah hutan, air, tanah, yang merupakan faktor lingkungan hidup yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ;
- b. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan ;
- c. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, Tentang Ketentuan-

- ketentuan Pokok Agraria ;
- d. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesehatan ;
 - e. Undang-undang Nomor 11 tahun 1962, Tentang Ketentuan-ketentuan Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum ;
 - f. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan ;
 - g. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

¹Dirjen Puod, Rapat Kerja Kepala Biro Pemerintahan se Indonesia, Ujung Pandang 18 Desember 1979, h.10 s/d 12

²Emil Salim, Pembangunan Lingkungan Hidup, Mutiara Jakarta, 1979, h. 131 - 135.

³R.E. Soeriaatmadja, "Lingkungan, Pengembangan Tata kota, Tatawilayah & Perencanaan Nasional", Widyapura, No.-5-6, Th.I/1977, h. 15.

B A B III

PENIBJAUAN TENTANG KEMUNGKINAN YANG ADA SEBAGAI
FAKTOR PEMBANTU MENUJU KEBERHASILAN RENCANA
PEMEKARAN KOTA

Pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro yang pada pentahapannya adalah pembangunan daerah dalam pengertian administratif dan dalam proses pengolahan, tidak bisa dipisahkan dari pembangunan daerah dalam arti ekonomi, yang bertujuan hendak mencapai kesatuan ekonomi yang makin sehat dan merata diseluruh wilayah daerah kabupaten, sebagaimana telah dicanangkan dalam buku rencana pembangunan daerah (regional planning) buku ke I. Selanjutnya untuk pengembangan wilayahnya, ditentukan pula pengembangan wilayah-wilayah ekonominya. Pengertian wilayah ekonomi di sini, adalah daerah atau areal yang merupakan kesamaan ekonomi yang harus dihadapi bersama. Maka berpijak pada pengertian tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro menentukan sub-sub region/daerahnya sebagai berikut :

- a. sub region I daerah surplus / baik ;
- b. sub region II daerah sedang ;
- c. sub region III daerah kritis.

Ad.a. Meliputi daerah-daerah dalam Kecamatan Bojonegoro, Dabder utara, Sugihwaras/Tenayang utara, Kedungaden utara, Kepohbaru, Raureno, Kanor selatan, Sumberejo

Balen, Kapas, Kalitidu, Purwosari dan Padangan.

Alasan-alasan, bahwa daerah-daerah tersebut mempunyai potensi pengembangan ekonomi yang membantu dalam pengembangan ekonomi selanjutnya dibidang industri pertembakauan, polowijo dan padi, jalur-jalur jaringan jalannya lancar sehingga perputaran atas barang-barang hasil produksi kepada konsumen dan pemasarannya lancar.

Ad.b. Meliputi daerah-daerah Kecamatan Kedungadem, Sugihwaras/ termasuk Temayang, Kanor dengan daerah-daerah sepanjang aliran bengawan Solo, Dander, Ngasem, Tambakrejo dan Ngraho.

Alasan-alasannya, bahwa daerah-daerah tersebut bisa dikembangkan dengan prinsip-prinsip ekonomi, jaringan-jaringan jalan, jembatan perlu mendapatkan prioritas.

Ad.o. Meliputi daerah-daerah pedalaman yang mayoritas daerah-daerahnya merupakan rumah tangga tertutup yaitu daerah Kecamatan Ngambon, Sugihwaras selatan serta daerah-daerah perbatasan Jawa Tengah.

Alasan-alamannya, bahwa pengelompokan masyarakatnya sangat berpencar, kepadatan penduduk sangat tipis, jaringan-jaringan jalan / jembatan sangat rusak, pisik alamnya kurang membantu dalam pengembangan ekonomi rakyat, serta daerah-daerah tersebut perlu sekali mendapatkan bantuan dibidang security keamanan politis

(daerah ex kompro Pandan / PKI)⁴

Maka dapat disimpulkan, bahwa sub region I daerah surplus/baik dan sub region II daerah sedang, adalah merupakan potensi pengembangan ekonomi yang sangat menentukan perikehidupan dan penghidupan masyarakat yang bersangkutan. Tetapi potensi tersebut akan merupakan suatu simbol yang megah saja manakala tak ditunjang dengan potensi lain, berupa kemampuan para pelakunya yang berdedikasi tinggi dalam tugasnya sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan kerjanya.

1. Struktur Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bojonegoro

Di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan perlu sekali mengadakan penetapan pendistribusian pekerjaan, pembatasan tugas dan tanggung jawab, penetapan komunikasi/koordinasi antara semua unsur organisasi sehingga memungkinkan manusia sebagai unsur utamanya bisa kerja sama se-efisien dan se-efektif mungkin. Maka sebelum menguraikan lebih lanjut tentang struktur organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bojonegoro, terlebih dahulu saya mengemukakan beberapa pengertian tentang struktur organisasi dari beberapa batasan yang diberikan oleh para sarjana/ahli, sebagai berikut :

a. Dimock ;

"struktur itu tiada lain daripada peta-peta diagram, rutine-rutine, buku-buku petunjuk, instruksi-instruksi

atau kata-kata semata-mata sampai munculnya fungsi kepegawaian untuk memilih orang-orang yang akan mengisi kedudukan-kedudukan yang telah diletakkan di atas gambar dan tertera di dalam rencana organisasi dan melatih pegawai mereka untuk menjalankan kewajiban masing-masing serta pelbagai ragam hubungannya.⁵

b. S.LS. Danoredjo ;

"struktur adalah organisasi yaitu kerja sama berdasarkan pembagian kerja yang tahan lama".⁶

Kemudian dikatakannya bahwa kerja sama itu dilakukan oleh organ-organ yang menjadi bagian dari pada organisasi tadi, dan dalam prakteknya tugas pekerjaan organ-organ itu dijalankan oleh manusia, tingkah laku manusia yang melakukan kerja sama tadi dikoordinasi, oleh karena itu maka organisasi merupakan rangka koordinasi, atau schema koordinasi. Sifat tahan lama pada pembagian kerja mutlak harus ada, bila tidak maka kerja sama itu tak dapat dikatakan sebagai telah diselenggarakan dalam hubungan organisasi.⁷

c. Drs. Soetarto ;

"struktur organisasi ialah kerangka yang terdiri satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat dengan tugas wewenang serta hubungannya satu dengan lainnya yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam lingkungan kesatuan yang unik".⁸

d. Drs. Pamoedji MPA ;

"pola struktur organisasi adalah suatu kerangka/framework yang menunjukkan :

1. adanya segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan ;
2. hubungan antara tugas pekerjaan yang ada dalam organisasi ;

3. hubungan wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi, yang memikul tiap-tiap tugas pekerjaan tersebut."

Dari uraian : beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang baik harus memenuhi beberapa syarat/ketentuan :

- a. adanya penentuan dan pembatasan yang tegas atas kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi ;
- b. adanya pembagian tugas-tugas pekerjaan yang tegas kepada bagian-bagian / pegawai-pegawai guna melaksanakan sejumlah kegiatan-kegiatan ;
- c. terlihatnya jalur-jalur hierarchis horizontal dan vertikal antara bagian yang satu dengan yang lainnya, antara bawahan dan atasan ;
- d. terlihat dan tampak adanya tempat kedudukan masing-masing pejabat/pegawai di dalam schema organisasi yang bersangkutan ;
- e. adanya pendelegasian atau pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing bagian atau pejabat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditugaskan kepadanya.

Menurut pengamatan saya selama ini, maka struktur organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bojonegoro di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, para aparat/pejabat yang terlibat di dalamnya baik yang berkedudukan sebagai pimpinan (manager) maupun sebagai

bawahan (staf) telah menunjukkan pemenuhan syarat-syarat organisasi yang baik, di samping tetap berhaluan atau berpedoman pada Undang-undang nomor 5 tahun 1974, yang serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu pelaksanaan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Selanjutnya, secara kronologis saya uraikan struktur organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bojonegoro dengan dasar urutan sebagai berikut :

a. Dasar hukum.

- (1). Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978.
- (2). Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II Bojonegoro Nomor 16 tahun 1978, tanggal 25 Desember 1978, disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1979 - dengan suratnya nomor HK./213/-1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Bojonegoro tahun 1979 Seri C pada tanggal 18 September 1979 Nomor 4/C.

b. Susunan organisasi dan tata-kerja.

- (1). Bupati Kepala Daerah Tingkat II, menurut hak dan kewajibannya harus menjamin adanya kerjasama yang serasi diantara semua aparat pemerintahan di daerah, guna mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan

demikian dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas, dan dalam kedudukan yang sama tinggi yaitu Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislatif. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membawahi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II secara langsung dan bagian-bagian secara tidak langsung.

- (2). Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II, membawahi bagian-bagian secara langsung yang masing-masing bagian dikepalai oleh Kepala Bagian :
 - (a). bagian pemerintahan ;
 - (b). bagian hukum dan organisasi dan tatalaksana;
 - (c). bagian keuangan ;
 - (d). bagian perekonomian ;
 - (e). bagian pembangunan ;
 - (f). bagian kesejahteraan rakyat ;
 - (g). bagian umum, humas dan protokol ;
 - (h). bagian kepegawaian.
- (3). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, membawahi secara langsung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
Sekretariat Dewan tersebut sejajar kedudukannya dengan bagian-bagian yang dikuasai oleh

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II, tetapi secara tidak langsung juga dibawah Sekretaris Wilayah/Daerah tersebut.

Dari bentuk / susunan struktur organisasi tersebut, maka berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya daripada masing-masing bagian dalam organisasi dapat disimpulkan bahwa jalur / saluran perintah dan tanggung jawab dari pimpinan sampai dengan pelaksanaannya disusun dari atas ke bawah, sedangkan bila dilihat dari hubungan kewenangannya maka organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bojonegoro tersebut mempergunakan bentuk organisasi lini dan staf.

Administrasi yang dilaksanakan, pada dasarnya adalah merupakan community development administration atau administrasi pembangunan masyarakat, oleh karena segenap proses penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat pemerintahan pusat di daerah ataupun oleh aparat daerah sendiri sesuai dengan status dan jabatannya diarahkan dalam suatu usaha bersama yang berkenaan dengan pembangunan masyarakat di bawah satu koordinasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah.

Tersusunnya struktur organisasi tersebut, tak mustahil akan menjadi tidak berguna manakala di dalamnya tak didukung dengan tertib dan lancarnya proses administrasi yang dikelola oleh aparatnya yang bermutu

tinggi, bertanggung jawab, bersih dan berwibawa sebagai aparat yang benar-benar menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas-tugas negara yang dibebankan di atas pundaknya, karena pada hakekatnya suatu sistem administrasi yang efektif dan efisien tentunya akan menuntun memperlancar jalannya mekanisme organisasi yang bersangkutan. Lebih luas dan dalam lagi artinya, bila administrasi yang dimaksud adalah mengenai soal keuangan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh d'Audiffret seorang pujangga Perancis dalam bukunya yang berjudul "System Financier de la France" (sistem keuangan Perancis) yang terjemahannya antara lain sebagai berikut :

administrasi keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada nasib sesuatu bangsa, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh pada menjuruskan kegiatan itu dapat menyebabkan kemakmuran atau kelesuan, kejayaan atau kejatuhan bangsa itu. Kepandaian mengendalikan Negara akan tidak memberikan hasil yang memuaskan dan abadi tanpa cara pengendalian keuangan yang baik, terlebih tanpa kemampuan melihat kemuka dengan penuh kebijaksanaan yang harus diarahkan pada melindungi dan memperbesar harta negara dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sangat erat hubungannya¹⁰

Dari pengertian administrasi yang lain, yang perlu saya kemukakan adalah penjelasan The Liang Gie:

1. administrasi dalam arti sempit ini meliputi seluruh kegiatan surat menyurat, mengetik, pengagendaan, dokumentasi dan lain-lain sebagainya, yang mana disebut juga tata usaha.
2. administrasi dalam arti luas, adalah: segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu¹¹

Kemudian administrasi dalam arti luas tersebut dapat disoroti dalam 3 segi, yaitu : Institusionil, Fungsionil dan Proses.

Administrasi dalam arti institusionil, merupakan kelompok orang-orang yang menjalankan proses kegiatan kearah tercapainya tujuan bersama, sedangkan dalam arti fungsionil adalah segala kegiatan kegiatan yang dilakukan kearah mencapai sesuatu tujuan, akhirnya administrasi dalam arti proses adalah segala kegiatan-kegiatan sejak dari perumusan tujuan, sampai penyelenggaraan sehingga tercapai tujuan¹²

Sedemikian penting pengertian administrasi yang saya uraikan berdasar dari pendapat para ahli tersebut, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa struktur organisasi yang baik dan teratur dan didukung adanya administrasi yang baik pula, adalah merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi tercapai atau gagalnya tujuan Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro memekarkan wilayah kota atau daerahnya.

2. Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pelaksanaan Dan Perwujudan Pemekaran Wilayah

Pada saat belum diundangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka jalur-jalur perkembangan proses pemerintahan di daerah masih terasa belum selancar sekarang. Hal ini disebabkan karena masih adanya jalur-jalur yang bersimpang-siur atau berliku-liku, sehingga timbul berbagai hambatan terutama dalam mekanisme administrasi pe-

merintahan dan pembangunannya. Akibatnya hasil yang bisa dinikmati dari sektor tersebut, umumnya belum se-efektif dan se-efisien sesuai dengan apa yang telah digariskan walaupun di sana-sini memang telah ada kemajuan-kemajuan atau peningkatan-peningkatan.

Kemudian dengan adanya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tersebut, yang menjadi pokok landasan pelaksanaan pemerintahan di daerah maka semakin jelaslah garis-garis program pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh aparat-aparatnya di daerah, apalagi setelah diberlakukannya susunan organisasi tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah yang dikenal sebagai Struktur Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang tertera pada lampiran surat keputusan Mendagri nomor 130 tahun 1978, dan kemudian dituangkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Bojonegoro nomor 16 tahun 1978 seperti yang telah saya sebutkan di muka. Maka tiap-tiap unsur yang terdapat di dalamnya mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya dalam rangka meningkatkan mutu hasil pemerintahan dan pembangunan selama ini.

Dari hal-hal tersebut di atas, yang perlu diperhatikan adalah : mencari titik keseimbangan yang wajar antara dua macam kehendak yaitu di satu pihak Pemerin-

ta Daerah sebagai "public service" yang menginginkan adanya pelayanan semaksimal mungkin terhadap masyarakatnya, sedangkan dilain pihak sebagai masyarakat tetap diinginkannya suatu sistem pemerintahan dan pembangunan yang flexible, mudah dicerna dan dimengerti maksud tujuannya, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari adanya kericuhan-kericuhan yang amat merugikan sebagai akibat masih terdapatnya jalur-jalur proses pemerintahan dan pembangunan yang berbelit-belit.

Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro mempunyai wewenang penuh (berdasarkan Peraturan Daerah) di dalam mempersiapkan dan melaksanakan usaha pemekaran wilayahnya. Dan dapat saya jelaskan di sini, bahwa dalam menjalankan tugas-tugas pokok pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsinya dalam hal pemekaran tersebut meliputi :

- a. perencanaan, yaitu : segala usaha dan kegiatan di-bidang pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data yang diperlukan serta menyusun rencana-rencana untuk pemekaran wilayah / daerahnya ;
- b. administrasi, yaitu : segala usaha dan kegiatan di-bidang tata-usaha, pengelolaan personil, materil dan keuangan ;
- c. koordinasi : yaitu penyelenggaraan koordinasi dengan instansi-instansi yang bersangkutan untuk memperlan-car pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pelaksanaan perencanaan, administrasi dan koordinasi yang tersebut di atas harus ditunjang dengan faktor "kepemimpinan" yang amat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu tujuan yang hendak dicapai, yang selalu menjadi pusat persoalan dalam memegang kemudi penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian besar dan luas pengaruh kepemimpinan tersebut, maka kepemimpinan menduduki tempat yang amat menentukan dan penting dalam organisasi.

Berhubung dengan sangat pentingnya faktor kepemimpinan ini, maka sudah waktunya bahwa tempatnya dalam management Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro perlu dibahas agar menjadi jelas, karena dalam keadaan apapun dan bagaimanapun faktor ini akan berpengaruh besar sekali di dalam pelaksanaan struktur organisasi pemerintah daerah, terutama dalam usaha mewujudkan pengembangan /- pemekaran daerah atau wilayahnya.

Berikut ini saya mengutip / menterjemahkan perumusan "kepemimpinan" dari pendapat beberapa orang ahli yaitu :

a. Ordway Tead ;

"Leadership is the activity of influencing people to cooperate toward some goal which they come to find desirable"¹³, yang terjemahannya adalah :

"Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempe-

ngaruhi orang-orang guna bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang diijinkan";

b. Howart W.Hoyt ;

"Leadership is the art of influencing human behaviour the ability to handle people".¹⁴ Yang terjemahannya kurang lebih demikian : "kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan mengendalikan orang-orang".

c. Kutipan dari kamus administrasi :

"kepemimpinan adalah proses pengaruh mempengaruhi antara pribadi atau orang dalam suatu situasi tertentu, melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu".¹⁵

Dari beberapa kutipan perumusan di atas, pengertian kepemimpinan dapat memperoleh tempat dalam skope yang luas. Seseorang dapat disebut pemimpin asal dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, meskipun tidak ada ikatan-ikatan yang kuat dalam organisasi. Dengan demikian pengertian kepemimpinan akan timbul di manapun, asalkan unsur-unsurnya telah dipenuhi yaitu : orang-orang yang dipengaruhi, orang-orang yang mempengaruhi, dan orang-orang yang mempengaruhi dan mengarahkan kepada suatu tujuan.

Problema yang akan timbul di dalam suatu organisasi khususnya organisasi pemerintahan di daerah adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin secara

tertentu menurut situasi dan kondisinya, dan menurut ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, seperti yang telah saya gambarkan dalam uraian struktur organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II di muka.

Input yang didapat oleh seorang pemimpin daerah di dalam melaksanakan policy pemerintah atasannya, memerlukan kecakapan khusus di dalam kemampuan menyerapnya, sehingga pendistribusian pekerjaan kepada bawahannya tidak mengalami kesulitan atau macet. Maka di dalam pendistribusian inilah seorang pemimpin harus memberikan perintah secara jelas serta memaksakan agar dipatuhi sepenuhnya. Pengertian memerintah dan memimpin, dalam praktek sukar sekali dipisahkan, akan tetapi selalu ada perpaduan. Apabila seorang pemimpin atau kepala memerintah bawahannya, mungkin akan berhasil hanya untuk jangka pendek dan akan diabaikan untuk jangka lama, demikian pula terdapatnya orang-orang yang karena soal-soal mental psikologis maka hanya dapat digerakkan apabila dengan perintah saja.

Oleh karenanya di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bojonegoro memerlukan tipe pemimpin yang benar-benar mengarah kepada perilaku yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam artian bahwa segala tindakan baik yang menyangkut soal pemberian perintah maupun penggarisan policy harus didasar-

kan kepada faktor-faktor perhitungan dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin kepemimpinannya secara nyata, mampu mengurus dan mengatur lingkungan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bertanggung jawab dalam arti bahwa semua tindakannya baik yang menyangkut soal pemberian perintah maupun penggarisan policy benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok daerah yang serasi tak bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengaturnya sepanjang masih sah berlaku.

Jadi di dalam uraian-uraian di atas, bermaksud memadukan antara pengertian-pengertian yang diberikan oleh Undang-undang nomor 5 tahun 1974, oleh struktur organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II beserta proses administrasinya, oleh pengertian kepemimpinan, yang selanjutnya akan menumbuhkan suatu gagasan bahwa organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro akan lebih hidup dinamis dan mantap apabila disertai dengan pola kepemimpinan yang sehat dan dinamis pula, terutama sekali dalam menangani bermacam-macam tugas negara di dalam era pembangunan nasional dewasa ini, khususnya di dalam usaha pengembangan atau pemekaran wilayah / daerah kemantren Sugihwaras yakni kemantren Temayang.

Saya berkeyakinan, bahwa usaha pemekaran ini walaupun nantinya akan berhasil dilaksanakan, namun bila aparatnya (terutama Camat) belum mempunyai ciri kepe-

mimpinan yang mencakup semua nilai-nilai obyektif di dalam dirinya terutama mengenai intelligence dan potensinya, maka pemekaran yang dimaksud hanya merupakan penambahan jumlah kecamatan saja tanpa adanya kemajuan atau perkembangan bidang kehidupan masyarakatnya, bahkan mungkin untuk meningkatnya pembangunan dan kehidupan masyarakatnya hanya menggantungkan hidupnya dari bantuan subsidi pemerintah, dan hal ini apabila benar terjadi maka tidak mustahil bila daerah baru tersebut harus dihapus.

Maka amat jelas bahwa pelaksanaan rencana pemekaran wilayah daerah di daerah Bojonegoro akan mengalami kesulitan besar apabila tidak didukung dengan faktor-faktor yang telah saya sebutkan di atas.

3. Tata Cara Pelaksanaan Pemekaran

Di dalam garis besarnya, bahwa pembangunan akan berhasil secara terarah sesuai dengan cita-cita, apabila sebelumnya didahului dengan suatu perencanaan,

Bahwa pada hakekatnya, perencanaan pemekaran yang dimaksud merupakan suatu usaha untuk membuat tata-ruang kota atau wilayah / daerah dalam suatu lingkungan hidup yang sehat, efisien serta dinamis.

Daerah kecamatan yang tumbuh sebagai akibat dari-pada terlalu luasnya daerah kecamatan yang lama, akan mengalami perkembangan yang tidak teratur apabila tumbuhnya tanpa perencanaan lebih dulu, sebab seluruh

aktifitas di daerah tersebut akan bercampur aduk, misalnya : daerah perkantoran bercampur dengan pusat perdagangan, pusat pendidikan/sekolah, industri dan perumahan penduduk dan sebagainya ; jalur-jalur jalan darat yang dibangun akan tidak berfungsi sebagai urat nadi perekonomian masyarakat desa dengan masyarakat kota melainkan sebagai jalur jalan bagi pejalan kaki biasa.

Perencanaan yang telah di susun oleh pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro adalah merupakan perencanaan kota sebagai dasar tumpuan menuju ke arah perkembangan atau pemekaran wilayah daerahnya.

Konsepsi pokok-pokok perencanaan kota tersebut meliputi :

- a. peraturan yang komplek antara berbagai zoning ;
- b. perkembangan yang di perkirakan ;
- c. tujuan dan cita-cita masyarakat kota ;
- d. bentuk dan sifat perkembangan yang dicapai ;
- e. rumusan kebijaksanaan yang akan dicapai ;
- f. perkembangan pemerintahan dan administrasi kota ;
- g. penggolongan rencana kota, terdiri atas :
 - (1). rencana garis besar (out line plan) ;
 - (2). rencana induk (master plan) ;
 - (3). rencana lingkungan (detail plan).
- h. landasan penyusunan kota, terdiri dari faktor-faktor:

wisma ; karya ; marga ; suka ; dan penyempurnaan.

Batas-batas umum antara perbedaan penggolongan rencana kota tersebut, adalah :

- (1). rencana garis besar (out line plan) :
 - (a). menentukan setiap penggunaan tanah dalam perencanaan tersebut secara menyeluruh ;
 - (b). menentukan luas areal setiap penggunaan tanah dengan dasar-dasar perhitungan dan disesuaikan dengan keadaan yang ada (existing land use) ;
 - (c). menentukan macam bangunan untuk mengisi setiap zone penggunaan tanah tersebut ;
 - (d). ukuran dari setiap macam bangunan maupun perencanaan jalan bersifat menyeluruh ;
 - (e). out line plan yang telah disahkan sudah dapat dilaksanakan tanpa menunggu master plan tetapi langsung pada detail plan.
- (2). rencana induk (master plan), adalah merupakan rencana lanjutan dari rencana garis besar tetapi lebih terperinci :
 - (a). setiap zone penggunaan tanah dilengkapi dengan ukuran pereil ;
 - (b). lebar jalan dan setiap penggunaan (jalan utama - sekunder - pembagi) dilengkapi dengan ukuran-ukuran ;
 - (c). hal-hal yang sudah ditentukan dan mendapat

- pengesyahan dalam rencana ini tidak dapat digeser lokasinya ;
- (d). pengesyahan dari rencana ini dapat dilakukan sebagaimana ~~demi~~ sebagaimana dari penggunaan tanah yang telah ditentukan pada out line plan ;
 - (e). apabila rencana garis besar (out line plan) telah disetujui / disyahkan oleh tingkat pusat maka pelaksanaan master plan dapat pula disetujui / disyahkan oleh pemerintah daerah.
- (3). rencana lingkungan (detail plan), adalah lanjutan dari rencana induk yang sifatnya rencana pelaksanaan
- (a). rencana induk yang sifatnya rencana pelaksanaan
 - (b). setiap ukuran bangunan untuk mengisi setiap penggunaan zone yang telah ditentukan pada rencana induk harus dilengkapi dengan : ukuran bangunan itu sendiri, ukuran kapling, jarak / garis sepadan, ukuran lebar jalan dan ukuran profil, ukuran / posisi jaringan-jaringan sanitasi - telepon dan gas terhadap jalan dan sehubungan dengan garis sepadan.

Selanjutnya perlu saya kemukakan di sini, bahwa sebelum mengadakan studi / survey serta menyusun rencana kota tersebut maka pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro telah mempersiapkan team perencanaan dan peraturan perundangan sebagai dasar hukumnya.

Setelah team perencana dan peraturan perundangannya

telah disiapkan, maka pengetrapan / pelaksanaannya segera dijalankan, yang sebelumnya juga telah dibentuk sebuah team penertiban pelaksanaan rencana kota.

Hubungannya dengan rencana pemekaran wilayah / daerah yang menjangkau sampai kedaerah kecamatan sasaran (Sugihwaras / Temayang), maka diterapkan pula sistem-sistem yang telah saya uraikan di atas terutama dalam tata cara yang telah ditentukan dalam rencana garis besar (out line plan)nya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengetrapannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah ini. Metode penyuluhan yang bersifat penjelasan kepada masyarakat adalah yang dipakai oleh team perencana pada waktu melakukan survey dan hal ini merupakan tindakan utama dan pertama dalam segi pendekatan sosial. Pengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat dalam team perencana kecamatan (sebagai pembantu team perencana kota) dikoordinir oleh Muspika setempat, di samping koordinasi yang mengikut sertakan unsur-unsur instansi vertikalnya.

4. Usaha-usaha Yang Telah Dilakukan Di dalam Rencana Pemekaran Wilayah

Dalam bulan Maret 1979, team perencana kota bersama sama dengan team survey D.P.U. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur bidang Cipta Karya, mengadakan peninjauan lapangan dikawasan Bojonegoro. Usaha yang dilakukan tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari pekerjaan

pekerjaan yang telah dirintis oleh pihak pemerintah daerah. Dan sebagai lazimnya setiap pekerjaan perencanaan apapun selalu didahului dengan pendekatan-pendekatan antara pemerintah daerah dengan badan-badan yang akan melakukan perencanaan. Dalam hal ini, langkah yang telah dicapai adalah terwujudnya kata sepakat antara pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro dengan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur bidang Cipta Karya tentang usaha pengumpulan data regional untuk bahan / input dalam penyusunan rencana regional daerah tingkat II Bojonegoro.

Selanjutnya yang telah saya ketahui, bahwa kegiatan tersebut telah berhasil melahirkan "Buku Kompilasi Data" yang intisariannya dapat saya uraikan di bawah ini :

- a. reconnaissance yang menggambarkan secara umum penilaian atas hasil visual survey mengenai bidang fisik daerah, kedudukan kota-kota yang berada di kawasan Kabupaten Bojonegoro, yang mempunyai kaitan dalam bidang perekonomian dan sosial/budaya kehidupan daerah serta hubungannya dengan daerah-daerah lain sekitarnya ;
- b. sebagai kumpulan data-data mentah yang terarah / terperinci yang berupa tabel atau daftar-daftar/ peta-peta potensi daerah dalam bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dari instansi / dinas-dinas pemerintah serta laporan-laporan lainnya yang berkedudukan di kota / daerah Kabupaten Bojonegoro.

Hasil wawancara saya dengan yang bersangkutan lainnya menyebutkan bahwa kedudukan daerah Kabupaten Bojonegoro dari skala Propinsi Jawa Timur dibagi atas 5(lima) daerah pengembangan, yaitu :

- a. daerah pengembangan bagian barat, dengan growth pole Madiun ;

- b. daerah pengembangan bagian selatan, dengan growth pole Malang ;
- c. daerah pengembangan bagian timur, dengan growth pole Jember ;
- d. daerah pengembangan bagian timur/utara, dengan growth pole Sumenep ;
- e. daerah pengembangan bagian wilayah C terdiri dari Prop. Jawa Timur, Kalimantan selatan, Bali dan beberapa kepulauan Nusa Tenggara, dengan growth pole Surabaya.

Menurut penjelasan pihak pengawasan lingkungan hidup Jawa Timur, mengatakan bahwa Jawa Timur dikelompokan atas kantong-kantong pengembangan, yaitu :

- a. daerah aliran kali Brantas ;
- b. daerah sekitar Jember-Bondowoso dan Lumajang ;
- c. daerah Banyuwangi ;
- d. daerah GERBANGKERTASUSILA ;
- e. daerah Pasuruan - Probolinggo ;
- f. daerah Madiun - arah kebarat ;
- g. daerah-daerah kering di Madura, Bojonegoro dan Tuban.

Dengan uraian di atas, maka dapat di simpulkan :

- (1). pengelompokan daerah pengembangan tersebut akan memudahkan penanggulangan masalah yang dihadapi daerah dalam usaha peningkatan kemampuan dari semua sektor yang diperlukan untuk menunjang perkembangan daerah secara internal ;
- (2). adanya faktor-faktor pendukung yang bersifat eksternal akan saling mempengaruhi kelompok itu ;
- (3). penilaian yang akan dilakukan secara umum di daerah Bojonegoro, akan lebih dititik beratkan pada sektor fisik dan ekonomi sebagai faktor utama dari sumber potensi daerah, sedangkan sektor sosial sebagai penggerak dari segala bentuk potensi ;

- (4). tujuan penilaian tersebut untuk mengetahui secara dekat balance antara kedudukan ekosistem sebagai wadah, dan sosial sistem sebagai potensi penggerak;
- (5). daerah Bojonegoro merupakan satu kesatuan field dengan daerah Tuban, dalam arti perankingan karakteristik daerah sehingga faktor yang mendorong perkembangan ekonomi daerah merupakan satu mata rantai.

⁴Pemerintah Daerah Tingkat II, Regional Planning, Buku I, Bojonegoro, h. 36.

⁵Dimock & Dimock, Administrasi Negara II, terjemahan Husni Thamrin Pane & I Ngurah Gede, Yasaguna, Jakarta, 1967, h. 9.

⁶S.LS.Danoeredjo, Struktur Administrasi & Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta, 1967, h. 1.

⁷Ibid.

⁸Soetarto, Contoh Pola Struktur Organisasi, Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gajah Mada, h. 3.

⁹S.Panoedji, Administrasi Negara, Institut Ilmu Pemerintahan, Malang, 1967, h.3.

¹⁰Y.Wajong, Administrasi Daerah, cet.IV, Ichtiyar, Jakarta, 1975, h.7.

¹¹M.Manollang, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah, PT. Pembangunan, Jakarta, 1973, h. 20.

¹²Ibid., h. 21.

¹³Depdagri, Pedoman Dinas Staff, Jakarta, 1975, h.20.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

¹⁶Wawancara dengan staf DPU-Bidang Cipta Karya
Jawa Timur, Surabaya, 15 Mei 1980.



B A B IV

HUBUNGAN RENCANA PEMEKARAN WILAYAH DENGAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa untuk menjamin agar supaya pembangunan nasional dapat berjalan serasi, perlu diusahakan adanya keselarasan antara pembangunan nasional (sektoral) dan pembangunan daerah (regional).

Maka peninjauan secara makro-ekonomi, pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah merupakan kesatuan kegiatan pembangunan yang integral yaitu satu dengan lainnya saling kait dan saling menjalin (konsisten), hingga dalam penyelenggaraannya sulit untuk dipisahkan. Meskipun demikian tetap terdapat perbedaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pekerjaan serta ruang lingkungannya, yaitu antara lain :

Pembangunan Nasional, merupakan unsur pokok dan utama serta dasar daripada pelaksanaan pembangunan daerah, di dalamnya menyangkut segala kegiatan yang terarah dan terpadu yang meliputi seluruh kepentingan Nasional serta seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan Daerah, merupakan bagian atau pelengkap dan penunjang daripada pembangunan nasional, baik secara langsung terhadap Program / proyek Nasional di daerah maupun secara tidak langsung terhadap pencapaian target

sasaran dan tujuan pembangunan Nasional.

Oleh karenanya, strategi pembangunan daerah tidak diperbolehkan berlainan dan dipisahkan dengan strategi Pembangunan Nasional, demikian pula halnya dengan perencanaan pembangunan, pemekaran wilayah daerah di kawasan Bojonegoro ini.

Semua urusan pemerintahan termasuk di dalamnya prakarsa urusan pembangunan di daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan, demikian pula perangkat pelaksanaannya, sepenuhnya diserahkan kepada daerah yang bersangkutan. Dan kesemuanya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

1. Pentingnya Koordinasi Antara Unsur-Unsur Pelaksanaan Dengan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemekaran Wilayah

Prinsip-prinsip yang telah diutarakan dalam azas dekonsentrasi, desentralisasi maupun tugas-tugas perbantuan menyatakan bahwa semua yang menyangkut urusan pemerintahan termasuk di dalamnya urusan pembangunan di daerah / regional, kegiatannya dikordinir oleh pejabat kepala Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintahan Pusat.

Koordinasi tersebut akan berhasil baik, apabila sebelumnya telah ada komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan atasan dan dengan masyarakat sasaran. Hal ini akan menumbuhkan satu hubungan lahir batin, satu ke-

maan dalam mencapai tujuan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama akan keberhasilan ataupun kegagalannya. Khususnya dalam rangka pemekaran wilayah di Bojonegoro nantinya, semua aparat yang terlibat di dalamnya sudah seharusnya memperhatikan soal pentingnya komunikasi tersebut, terutama dalam usaha meningkatkan usaha penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti serta dengan teknik penyampaian yang baik.

Maka dengan telah dipakainya dan ditingkatkannya teknik-teknik berkomunikasi tersebut, akan lebih mudahlah cara-cara penyampaian penyuluhan-penyuluhan, penjelasan-penjelasan, motivasi-motivasi di dalam menanamkan pengertian latar belakang pemekaran wilayah daerahnya khususnya, pengertian latar belakang pembangunan nasional pada umumnya. Dan dengan demikian akan terciptalah suatu koordinasi yang rapi, terarah berdaya guna serta berhasil guna.

Sejalan dengan pengertian di atas, secara sepihak atas ijin yang telah diberikan pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro, di maksud dalam rangka kelengkapan penyusunan skripsi ini, maka sebagai hasil dari berkomunikasi (wawancara) dengan tokoh-tokoh masyarakat daerah sasaran (Kecamatan Sugihwaras dan Temayang) serta penduduknya, guna mengetahui lebih dekat tentang keadaan kehidupannya, ternyata hasilnya sesuai dengan input yang selama ini di dapat oleh pihak Pemerintah

Daerah, walaupun di sana-sini masih perlu penyempurnaan, dalam rangka persiapan pembentukan wilayah kecamatan yang baru (Temayang).

a. Keadaan geografis.

Jarak antara perwakilan kecamatan Temayang dengan ibukota kecamatan Sugihwaras \pm 8 Km, luas wilayah 11.827,181 Ha yang sebagian besar meliputi daerah hutan dan pertanian.

b. Penduduk.

Jumlah penduduk wilayah kecamatan Sugihwaras termasuk Temayang sampai dengan tahun 1979 berjumlah 61.731 jiwa, sedang untuk daerah Temayang sendiri berjumlah 27.918 jiwa.

c. Keadaan sosial ekonomi.

Mata pencaharian / penghasilan penduduk di wilayah kemantren Temayang dibidang pertanian yang meliputi produksi pertanian tanaman pangan padi, jagung, ketela pohon/ubi-ubian, kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, dan produksi tanaman lain seperti tembakau dan kelapa. Pemasarannya kedaerah Bojonegoro, Cepu, Kudus, Kediri dan Surabaya.

d. Keadaan Pemerintahan.

Kecamatan Sugihwaras terdiri dari 1(satu) perwakilan kecamatan Temayang dan 29 (dua puluh sembilan) desa serta pendukuhan. Khusus perwakilan Temayang membina 12 (dua belas) desa oleh seorang Mantri

Polisi Pamong Praja yang tidak penuh memerintah sebagai seorang Kepala Wilayah, maka dipandang perlu dalam rangka pembinaan wilayahnya status Mantri Polisi ini ditingkatkan sebagai Kepala Wilayah penuh sesuai dengan status kemantren ditingkatkan menjadi kecamatan.

Wilayah Kecamatan Sugihwaras terdapat 11 (sebelas) jenis instansi termasuk kantor kecamatannya, dan dikemantren Temayang terdapat 7 (tujuh) jenis instansi termasuk kantor kemantrennya.

e. Sarana hubungan.

Satu-satunya sarana perhubungan yang ada adalah jalan darat (jalan P.U.K.), makadam dan adanya pembangunan baru ataupun rehabilitasi jembatan-jembatan yang menghubungkan desa / pedukuhan yang satu dengan lainnya.

f. Sarana-sarana pelayanan kepada masyarakat lainnya.

Sarana pendidikan yang ada (S.D. Inpres - Madrasah beserta tenaga-tenaga guru) telah memadai jumlah anak didik. Sarana kantibmas cukup terdidik sebagai komponen Tannas didesa, dan sarana kesehatan masyarakat berupa Puskesmas telah cukup dipahami fungsinya oleh masyarakat.

2. Sumber Keuangan Daerah Dalam Pembangunan Daerah

Demikian luas masalah-masalah yang harus dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro

di dalam penyusunan rencana pemekaran wilayah daerahnya terutama untuk wilayah daerah Kecamatan Sugihwaras yang akan menuju kepada pembentukan kecamatan baru yaitu Kecamatan Temayang, maka akhirnya nanti membutuhkan konsentrasi keuangannya sebagai faktor pembiayaan yang realisasinya sampai dengan saat ini masih di dalam taraf permulaan penyusunan pos-posnya, walaupun telah dibentuk susunan teamnya sejak medio 1976 yang lalu.

Namun demikian, pihak pemerintah daerah selalu menyajikan susunan A.P.B.D. - nya dalam kerangka garis besarnya saja. Adapun bentuk susunan A.P.B.D. Tingkat II Bojonegoro tahun anggaran 1980/1981, sebagai berikut :

- a. Sumber A.P.B.D. (asli daerah sendiri).
- b. Dana pemberian dari Pemerintah.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut penerimaan pada tahun anggaran terdiri dari :

a. Pembiayaan rutin :

- (1). sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;
- (2). subsidi/perimbangan dari negara ;
- (3). bantuan pajak kendaraan bermotor dari daerah tingkat I ;
- (4). pajak daerah ;
- (5). retribusi daerah ;
- (6). bagian laba dari perusahaan daerah ;
- (7). penerimaan dari dinas-dinas ;
- (8). penerimaan yang tidak masuk bagian lain ;
- (9). urusan kas dan perhitungan.

b. Pembiayaan pembangunan :

- (1). sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;
- (2). bantuan pembangunan daerah tingkat II ;
- (3). pendapatan IPEDA/IREDA ;
- (4). opsen pemberian hak atas tanah ;

- (5). pendapatan asli daerah sendiri ;
- (6). pinjaman (dana bank) ;
- (7). INPRES perkapita ;
- (8). INPRES sekolah dasar ;
- (9). INPRES kesehatan ;
- (10). INPRES penghijauan ;
- (11). bantuan proyek dari Dati I untuk RSU ;
- (12). subsidi sekolah dasar.

Menurut pengeluaran pada tahun anggaran terdiri dari :

a. Pembiayaan rutin :

- (1). urusan umum pemerintahan ;
- (2). sekretariat pekerjaan umum kabupaten ;
- (3). lalu lintas darat/sungai ;
- (4). sektor kesehatan ;
- (5). sarana pendidikan dan kebudayaan ;
- (6). sektor sosial politik ;
- (7). angsuran dan hutang bunga ;
- (8). pensiunan dan onderstand ;
- (9). pengeluaran yang tak termuat dalam pos lain ;
- (10) urusan kas dan perhitungan.

b. Pembiayaan pembangunan :

- (1). proyek-proyek daerah bidang ekonomi, sosial, umum, bidang subsidi pembangunan kepada daerah bawahan ;
- (2). urusan kas dan perhitungan ;
- (3). INPRES daerah tingkat II ;
- (4). INPRES sekolah dasar ;
- (5). INPRES kesehatan ;
- (6). subsidi desa ;
- (7). INPRES penghijauan. 17

Tertumpu pada kenyataannya proses pemekaran tersebut turut berjalan s irama dengan perencanaan pembangunan pada sektor-sektor yang lain, maka usaha pihak Pemerintah Daerah untuk mendesak pihak atasan agar secara resmi memberikan jawaban atas usulannya masih terus dilakukan sambil terus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan administrasi keuangannya.

3. Hambatan-hambatan

Adalah merupakan suatu hal yang biasa, manakala suatu kegiatan dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, yang di karenakan adanya faktor-faktor lain yang kurang diperhitungkan peranan dan fungsinya. Hambatan yang perlu diperhatikan di sini adalah masih adanya beberapa masalah di daerah dalam hubungannya dengan rencana pemekaran wilayah yang belum terpecahkan, yang pada akhirnya nanti apabila masalah tersebut masih jua belum di atasi, akan merupakan faktor penghambat lancarnya pembangunan.

Hambatan-hambatan tersebut meliputi :

a. Bidang pemerintahan.

Penyerapan maupun peresapan pengertian Undang-undang nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, dan Undang-undang nomor 5 tahun 1979, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Desa, oleh seluruh perangkat pemerintahan di desa kurang merata, sehingga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa tersendat sendat. Demikian pula masih adanya beberapa orang Kepala Desa dan pamong desa lainnya yang kurang mampu menerima perintah atasan, sebagai akibat masih rendahnya pendidikan (ijazah S.D., atau bahkan tak mempunyai ijazah), sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, apalagi kenyataan yang ada di pedesaan

masih adanya kebiasaan-kebiasaan yang bersifat tradisional pasif.

b. Bidang ekonomi.

- (1). masih adanya dan bebasnya tengkulak-tengkulak tembakau yang dikemukakan oleh orang-orang Cina sehingga petani tembakau merasa dirugikan.
- (2). masih terhamparnya tanah-tanah kritis yang belum bisa dihidjaukan.
- (3). penggundulan tanah hutan sebagai akibat adanya penebangan kayu secara liar, masih merupakan problem yang memerlukan penanganan khusus.

c. Bidang sosial budaya.

- (1). belum meluasnya kesadaran ber-keuarga berencana serta pengertian akan fungsi taman gizi.
- (2). masih banyaknya anak-anak putus sekolah, sebagai akibat kurang mempunya pembiayaan meneruskan sekolah atau belum terdapatnya lapangan pekerjaan untuk menampungnya.

d. Bidang pembangunan.

- (1). sering terjadi kelongsoran tanah, sebagai akibat keadaan tanah yang bergerak.
- (2). masalah penanganan khusus untuk penambahan tenaga juru ukur oleh pihak Pemerintah Daerah belum juga dilaksanakan.
- (3). masalah belum cukupnya jumlah tenaga-tenaga teknis dalam penanganan pelaksanaan pembangunan.

(4). masalah belum adanya master plan.

e. Bidang keuangan.

- (1). belum terpenuhinya tertib administrasi tentang pembuatan surat pertanggung jawaban atas pemakaian uang subsidi desa.
- (2). belum adanya kesadaran secara menyeluruh dari para wajib pajak.
- (3). belum intensipnya cara penarikan pajak.
- (4). dipihak atasan (pemerintah daerah) masih dilihat kurangnya tenaga-tenaga skill khusus di bidang keuangan.

f. Bidang pengawasan.

- (1). pengawasan dan pembinaan administrasi keuangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sering terlambat pelaksanaannya, dikarenakan masih terbatasnya jumlah petugas pemeriksa yang disediakan oleh pihak Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (2). belum cukupnya sarana perjalanan dinas menuju daerah sasaran pemeriksaan.

¹⁷ Pemerintah Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah, Buku I & II, Bojonegoro, 1980/1981.

B A B V

P E N U T U P

Semua yang telah saya uraikan di dalam bab-bab yang terdahulu adalah merupakan hasil penelitian (studi) dilingkungan Wilayah Daerah Tingkat II Bojonegoro (Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro dan diwilayah daerah Kecamatan Sugihwaras/Temayang) dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur bidang Cipta Karya serta di Kantor BAPPEDA dan Biro Pembangunan Tingkat I Jawa Timur Surabaya, dalam usaha saya mengumpulkan data-data regional untuk input dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa :

1. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, khususnya dalam rangka persiapan rencana pelaksanaan pemekaran wilayahnya telah benar-benar berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam undang-undang yang diberlakukan tersebut telah diatur bagaimana cara-cara melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan teratur, yang berdaya guna dan berhasil guna, yang sepenuhnya ditujukan kepada pelayanan kebutuhan masyarakat.
3. Pelaksanaan rencana pemekaran wilayah tersebut adalah sebagai realisasi dari Pola Rencana Kota yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan dan membutuhkan koordinasi seluruh perangkat pelaksana-

dari tingkat paling atas sampai paling bawah.

4. Usaha menyadarkan masyarakat terhadap masalah lingkungan hidupnya adalah merupakan faktor yang tidak bisa begitu saja di abaikan oleh semua unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan pemekaran wilayah tersebut.
5. Pengaruh fungsi struktur organisasi yang di dukung oleh tertib administrasinya, amat menentukan keberhasilannya.
6. Belum adanya master plan, tidak berarti akan terbengkelainya kegiatan pembangunan termasuk di dalamnya usaha pemekaran wilayah Kecamatan Sugihwaras / Peman-tren Temayang tersebut, oleh karena penyempurnaan materinya masih terus di lakukan yang di sesuaikan dengan kemajuan pembangunan regional maupun sektoral.
7. Dukungan perimbangan keuangan pada saat ini belum memungkinkan A.P.B.D. Tingkat II Bojonegoro secara penuh menunjang pelaksanaan pemekaran, meskipun pada kenyataannya kegiatannya telah dilaksanakan sejak medio tahun 1976.
8. Hambatan-hambatan yang masih ada, merupakan suatu hal yang harus di hadapi dan di tanggulanginya secara tekun dan bertahap dalam penghapusannya, mengingat keadaan masyarakat dan geografis daerahnya.

Adapun saran-saran yang perlu di sampaikan, kemungkinan jangkauannya terlalu sempit atau bahkan terlalu sukar di terima oleh pihak Pemerintah Daerah Tingkat II

Bojonegoro untuk dilaksanakan adalah merupakan suatu beban yang harus di atasi secara seksama.

Saran-saran yang di maksudkan, tidak saja terhadap usaha pengembangan atau pemekaran wilayah daerah, namun meliputi setiap usaha pembangunan regionalnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam usahanya untuk menerima, mencerna dan melaksanakan peraturan perundangan pemerintahan dan pembangunan secara akurat, hendaknya di ciptakan suatu bentuk team ahli penerangan yang memadai dalam arti kuantitas maupun kualitasnya, menguasai teknik-teknik pembangunan sesuai dengan bidangnya, sehingga arti the right man in the right plan akan murni terwujud, selain instansi / jawatan penerangan yang telah ada.

Selanjutnya perlu sekali mendaya gunakan seluruh potensi yang ada di dalam rangka penyebar luasan latar belakang pembangunan serta tujuannya, yaitu dapat di tempuh cara-cara :

1. Melalui media tradisional, berupa pagelaran kesenian rakyat maupun pembentukan team-team safari, yang akan di pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang yang di kuasainya.
2. Melalui media modern, berupa pers, radio, film dan teve, yang lebih di tingkatkan mutu penyajiannya dan dengan cara serta teknik yang mudah dimengerti.
3. Melalui media dakwah, tanpa tujuan-tujuan politis.

Faktor lain yang perlu mendapatkan sorotan adalah masih belum adanya pembatasan secara tegas atas penguasaan atau pemilikan tanah-tanah agraris oleh sekelompok warga negara keturunan Cina berupa pendirian bangunan-bangunan gudang, oven-oven tembakau yang sebenarnya kurang menguntungkan bahkan sangat merugikan kehidupan para petani pemilik tanah serta kehidupan masyarakat sekitarnya, maka untuk menanggulangi hal ini disarankan sebagai berikut :

1. Pemberian penyuluhan aktif kepada petani pemilik tanah khususnya, para buruh tani pada umumnya tentang kegunaan tata tanah bagi sumber kehidupan keluarganya.
2. Apabila memang karena situasi dan keadaan yang memaksa mengingat kebutuhan para petani sendiri, maka hendaknya pihak pemerintah khususnya Pemerintah Daerah memberikan izin terbatas hanya pada penggunaan sementara atas tanah tersebut dalam arti izin bangunannya saja, dalam batas waktu yang telah ditentukan tanpa menyimpang dari dasar Ketentuan Pokok U.U. No. 5 tahun 1960.

Mengenai lalu lintas jalan darat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat perlu sekali diperhatikan cara pelaksanaannya. Pemasangan rambu-rambu jalan seharusnya diperhatikan cara penempatannya dan perlu ditingkatkan pengadaannya mengingat usaha pelestarian pemakaian. Pengintegrasian yang dinamis dalam menanggulangi keamanan jalan, antara petugas pengaman jalan dan pemakai jalan se-

cara konsekwen mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

Kemudian dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, hendaknya cara/teknik pemungutan pajak-pajak sebagai pos penerimaannya dilakukan se-intensip mungkin dengan jalan memperbaiki cara/teknik lama yang kurang menguntungkan. Peningkatan mutu pengawas keuangan untuk mencegah adanya usaha penghindaran pajak dan penyelewengan-penyelewengan oleh aparat pelaksana pemerintahan dan pembangunan. Pos-pos pengeluarannya agar diteliti sasarannya sepanjang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jalan pemenuhan Panca Tertib, yaitu : tertib program ; tertib anggaran ; tertib administrasi ; tertib pelaksanaan ; tertib pengendalian/pengawasan.

Akhirnya bertolak pangkal pada tugas, kewajiban, serta wewenang-wewenang semua perangkat yang terlibat di dalam rencana pemekaran wilayah daerah tersebut dari eselon yang paling atas sampai eselon yang paling bawah diperlukan adanya satu kata dan perbuatan.

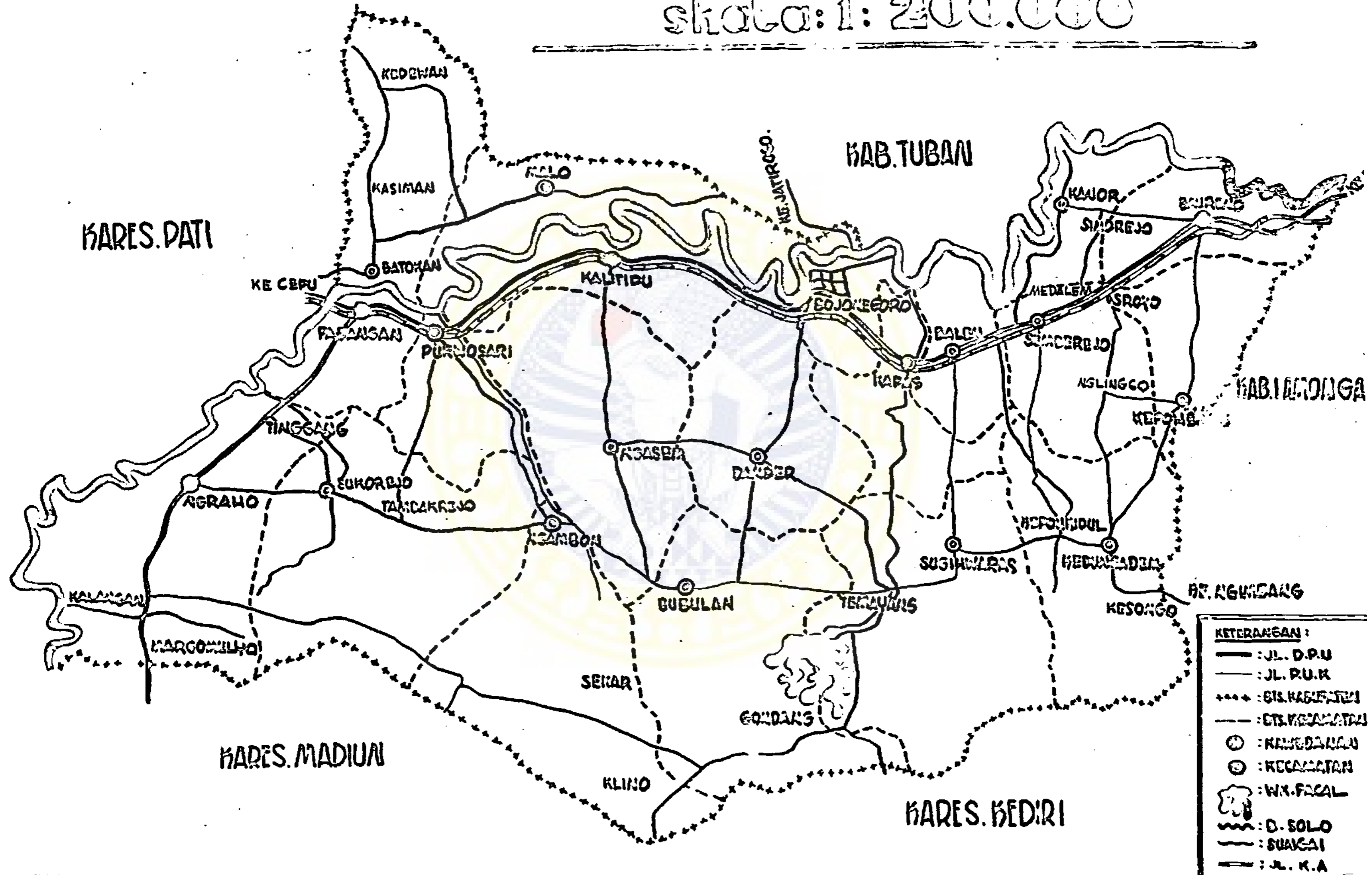
DAFTAR BACAAN

- Danoeredjo, S.L.S., Struktur Administrasi & Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta, 1967.
- Departemen Dalam Negeri R.I., Undang Undang Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah, No.5 Tahun 1974, Jakarta, 1974.
- _____, Undang Undang Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Desa, No. 5 Tahun 1979, Jakarta, 1979.
- DIRJEN PUOD, Rapat Kerja Kepala Biro Pemerintahan Se Indonesia, Ujung Pandang, 18 Desember 1979.
- Dimock & Dimock, Administrasi Negara II, terjemahan Husni Thamrin Pane Dan I Ngurah Gede, Yasaguna, Jakarta, 1967.
- Manullang, M., Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, PT. Pembangunan, Jakarta, 1973.
- Pamudji, S., Administrasi Negara, Institut Ilmu Pemerintahan, Malang, 1967.
- Pemerintah Daerah Tingkat II, Regional Planning, Buku I & II, Bojonegoro, 1975.
- _____, Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah, Buku I & II, Bojonegoro, 1980/1981.
- Salim, Emil, Pembangunan Lingkungan Hidup, Mutiara, Jakarta, 1979.
- Soetarto, Contoh Pola Struktur Organisasi, Balai Pembinaan Administrasi, Gajah Mada, Gunung Agung, Jakarta, 1973.
- Soeriaadmadja, R.E., "Lingkungan, Pengembangan Tata Kota, Tatawilayah & Perencanaan Nasional", Widyapura, No. 5-6, Tahun I/1977.
- The Liang Gie, Kamus Administrasi, Balai Pembinaan Administrasi, Gajah Mada, Gunung Agung, 1973.
- Wajong, J., Administrasi Keuangan Daerah, cet.IV, Ichtiyar, Jakarta, 1975.

L A M P I R A N

1. Peta PHSik Kabupaten Daerah Tk.II Bojonegoro.
2. Peta PHSik Kota Kabupaten Bojonegoro.
3. Peta PHSik Kecamatan Sugihwaras.
4. Peta Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Daerah sasaran Pemekaran Temayang.
5. Peta Rencana pembangunan Pengairan di Wilayah Daerah sasaran pemekaran Temayang.
6. Daftar susunan pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro dan Dinas Daerah-nya.
- 6B. Daftar susunan pejabat Instansi Vertikal Daerah Tingkat II Bojonegoro.
7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Wilayah / daerah Tingkat II Bojonegoro.

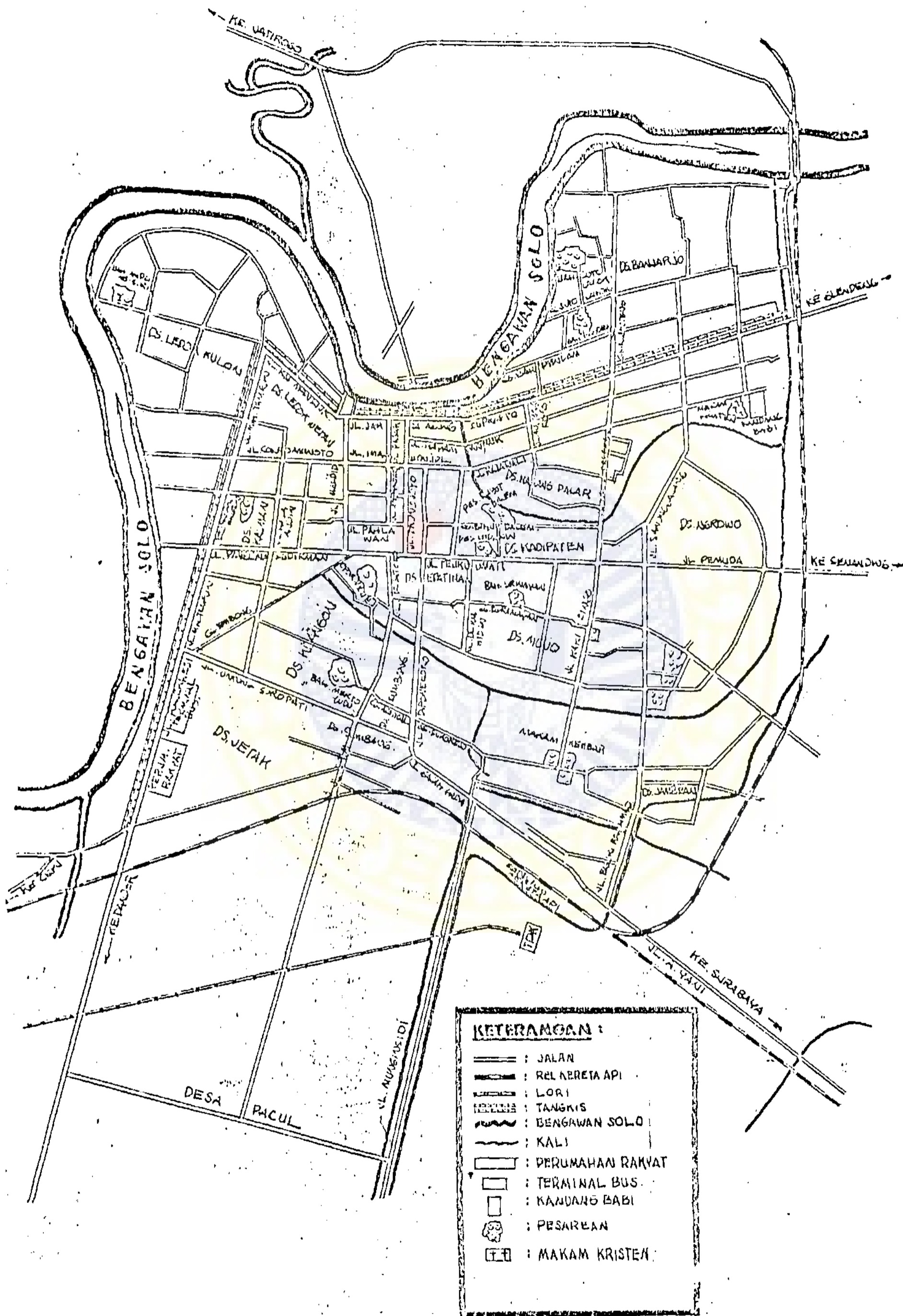
Peta Kabupaten Bojonegoro skala: 1: 200.000



- KETERANGAN :**
- : J.L. D.P.U
 - : J.L. P.U.K
 - : BIL. KABUPATEN
 - : BIL. KECAMATAN
 - ⊙ : KAWEDANAN
 - ⊙ : KECAMATAN
 - ☼ : WK. FACAL
 - ~ : D. SOLO
 - ~ : SUAGAI
 - : J. K.A

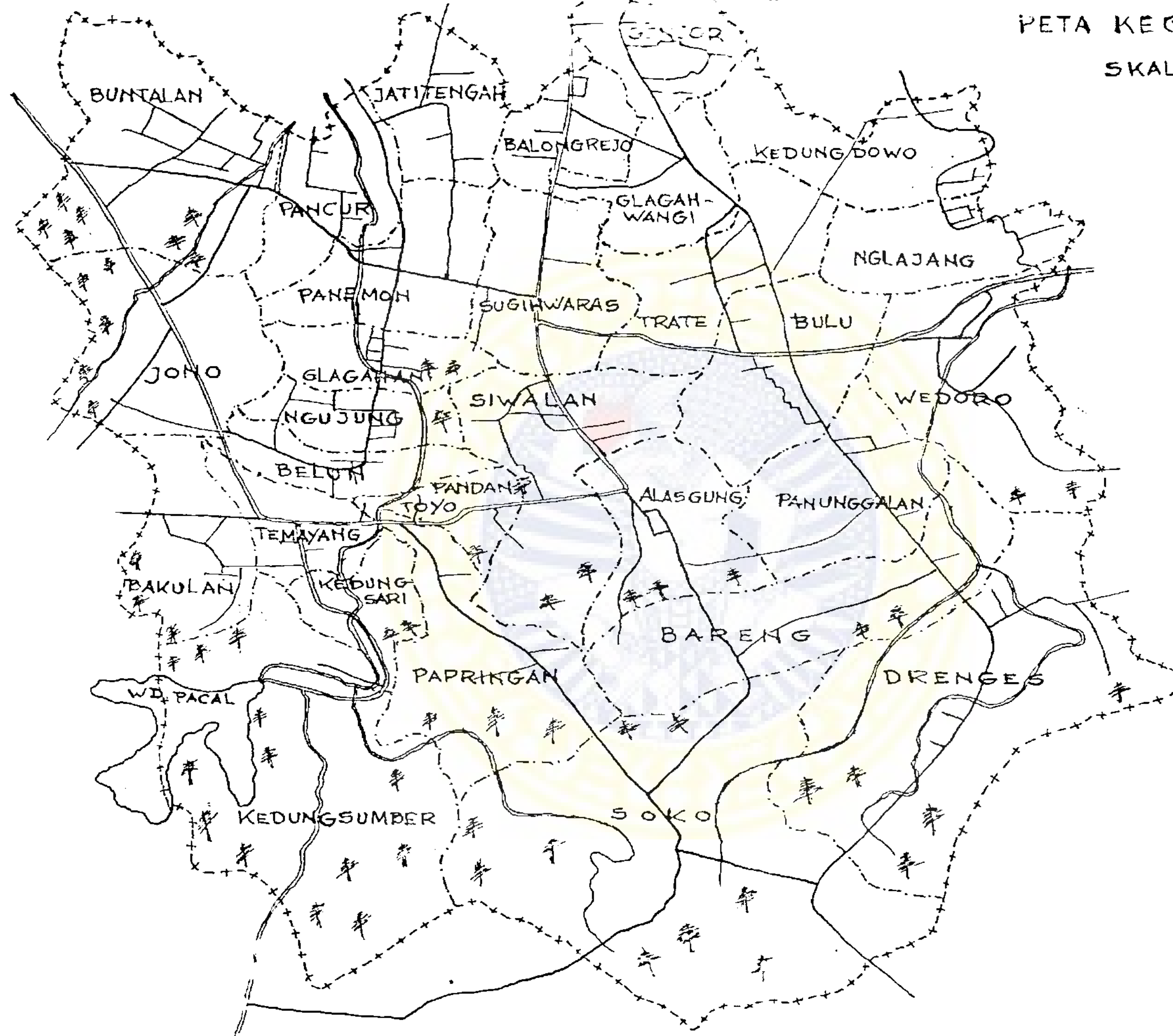
PETA KOTA BOJONEGORO

SKALA. 1:15.000



PETA KEC. SUGIHWARAS.

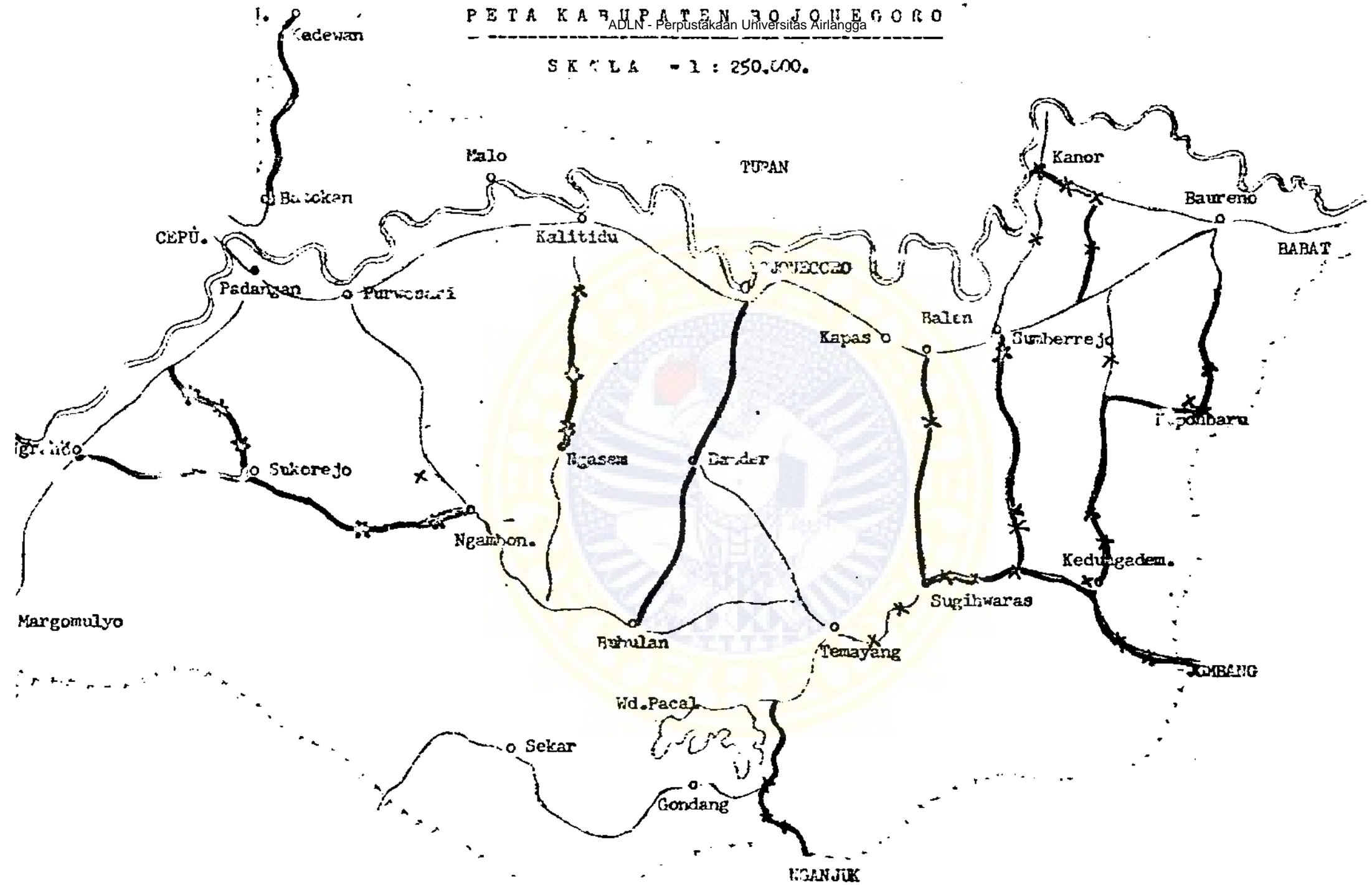
SKALA 1:25.000.



PETA KABUPATEN BOJONEGORO

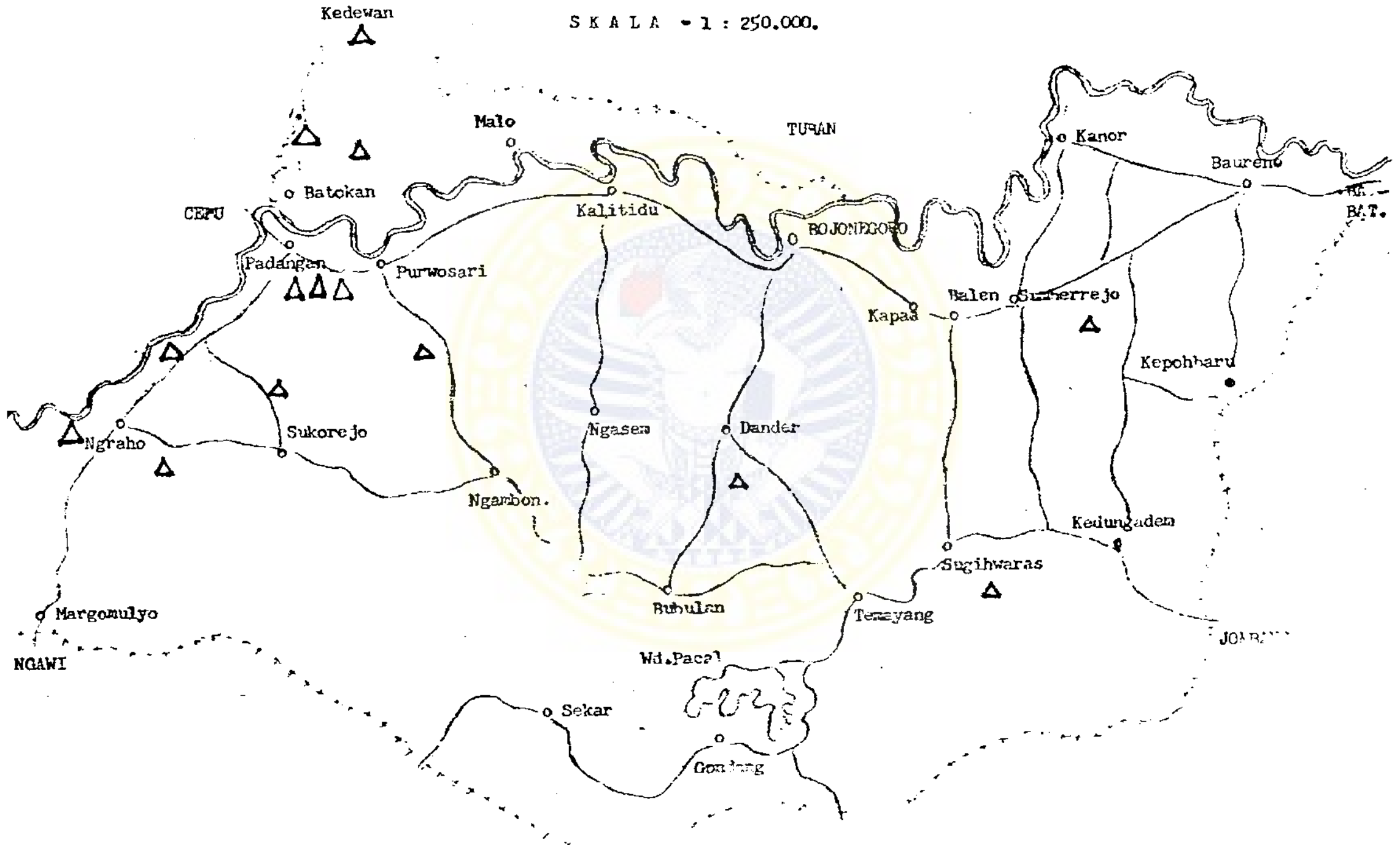
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKALA - 1 : 250.000.



PETA KABUPATEN BOJONEGORO

SKALA - 1 : 250.000.



No. Urut.	DINAS / JAWATAN	NAMA PEJABAT / JABATAN	Alamat Kantor / Rumah dan Nomor Telepon			
			Kantor	No. Telepon	Rumah	No. Tele.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<u>MUSPIDA KOORDINATOR.</u>	<u>SOEDONO SOEKIRDJO.</u> Dan Kewil 106.	Jl. Imam Bonjol Bojonegoro.	81306	Jl. Imam Bonjol Bojonegoro.	81406
2.		<u>R. H. ABDOELLAH DAHMAN, BA</u> Pembantu Gubernur, Bojonegoro.	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	(81901)	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81218
3.	<u>MUSPIDA TINGKAT II.</u>	<u>Drs. S O E W O N O .</u> Bupati Kdh Tk. II Bojonegoro.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81945	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81845
4.		<u>St. R A C H M A T .</u> Dan Dim 0813.	Jl. Imam Bonjol Bojonegoro.	81813	Jl. AKBP. H. Soeroko No. 9 Bojonegoro.	81713
5.		<u>S O E H A R D I , SH</u> Ketua Kejaksaan Negeri.	Jl. Kartini Bojonegoro.	81545	Jl. Panglima Su - dirman.	81346
6.		<u>S O E H A R T O , SH.</u> Ketua Pengadilan Negeri	Jl. Pahlawan 1 Bojonegoro.	81245	Jl. Panglima Su - dirman Bojonegoro	81345
7.		<u>S O E H A R Y O .</u> ✓ Dan Kores 1061	Jl. Panglima Su dirman Bojonegoro	81161	Jl. Panglima Sa - dirman Bojonegoro	81261
8.	<u>MANUR DIT / KA BAG / KA-</u> <u>DAIRY P. DAIRY TK. II BOJO -</u> <u>BOGORO.</u>	<u>H. MACHMUD ZAIN, SH.</u> Sekretaris Wilayah/Daerah	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81445	Jl. Panglima Su - dirman Bojonegoro	81269
10.		<u>RATTOPAN HARDJOSEPUTRO.</u> Ka Sub Inspektorat Daerah	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81122	Jl. Sumur Ringin No. 17 Bojonegoro	81433
					11. <u>ABDUL KADIR.....</u>	

11. 1	1		1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1		1	Jl. ... Bojonegoro.	1	
12. 1	1		1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81115	1	Jl. ... Bojonegoro.	1	
13. 1	1	1	1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81115	1	Jl. ... Bojonegoro.	1	81791
14. 1	1	1	1	Jl. AKBP. M. Soeroko Bojonegoro.	1	81259	1	Jl. Dr. Tjipto Bojonegoro.	1	81 -
15. 1	1	1	1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81530	1	Jl. Gajahmada 61 A Bojonegoro.	1	81497
16. 1	1	1	1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81115	1	Jl. Dr. Tjipto 224 Bojonegoro.	1	81 -
17. 1	1	1	1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81228	1	Jl. KH. Mansyur Gg. Slamet No.66 Bojonegoro.	1	81619
18. 1	1	1	1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81799	1	Jl. Cokroaminoto No.280 Bojonegoro.	1	81389
19. 1	1	1	1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81582	1	Jl. Panglima Su - dirman 10 Bojo - negoro.	1	81710
20. 1	1	1	1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81530	1	Jl. STM. Sumbang 29 Bojonegoro.	1	81 -
21. 1	1	1	1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81799	1	Jl. Bangun Teki 2 D Bojonegoro.	1	81 -
22. 1	1	1	1	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	1	81228	1	Jl. Tri Tunggal Gg. Kusnandar Bojonegoro.	1	81 -

23. SOEHARTONO, SH......

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23.		<u>SOEKIMINTO.</u> Ka Bang Des.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81659	Jl. Dr. Mahidin Bojonegoro.	81 -
24.		<u>T A B R I .</u> Ka Agraria.	Jl. Teuku Umar Bojonegoro.	81186	Jl. Diponegoro Bojonegoro.	81 -
25.		<u>Dr. TRIYONO.</u> Ka Din Kesehatan.	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81350	Jl. Diponegoro 13 Bojonegoro.	81543
26.		<u>MOCH. SOEBIYAKTO.</u> Ka Sub Bag Tata Usaha Din Kesehatan.	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81350	Desa Karangpacar Gg. Kandang Bojonegoro.	81724
27.		<u>ABDOEL AZIS.</u> Ka Sub Bag Humas.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81582	Kauman Bojonegoro.	81 -
28.		<u>MOCH. SOEROER.</u> Ka Din PUK.	Jl. Masjid Bojonegoro.	81447	Klangon Gg. III Bojonegoro.	81621
29.		<u>TOHA SASMITA.</u> Ketua BKKBN Kab. Bojonegoro	Jl. AKBP. M. Soeroko Bojonegoro.	81422	Jl. Sawunggaling Bojonegoro.	81500
30.		<u>TOHA SASMITA.</u> Ka Kwarcab Gerakan Pra- muka Kab. Bojonegoro.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81 -	- idon -	81500
31.		<u>S O E M A N I .</u> Ka Sug Bag Tata Usaha Mawil Mansip 13/XI.	Jl. Masjid Bojonegoro.	81113	Jl. Raya Glendeng Bojonegoro.	81 -
32.		<u>S. DJAHALI.</u> S.S.B. TELEKOMDA.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81231	Jl. Bangun Teki Bojonegoro.	81 -
33.	<u>D.P.R.D. TINGKAT II</u>	<u>MOCH. GANJAR.</u> Ketua DPRD.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81745	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81645
34.		<u>MOCH. JASMAN.</u> Ketua DPRD.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81745	Jl. Panglima Sudirman Bojonegoro.	81340
35.		<u>SAHAL SULEH.</u> Ketua DPRD.	Jl. Trunojoyo	81745	Jl. Raya Suberejo	81 -
36.	<u>KAMPUS: KOTA KEPALA</u>	<u>PIKET PENDA</u>	Jl. Trunojoyo	81826	- . -	-

Nomor Urut.	DINAS / JAWATAN	NAMA PEJABAT / JABATAN	Alamat Kantor / Rumah dan Nomor Telephon			
			Kantor	No. Telepon	Rumah	No. Telepon
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	KANTOR: DINAS PERTANIAN RAKYAT KABUPATEN BOJONEGORO.	SOEPARMAN, BSc. K P T R K.	Jl. Raya Sukowati Bojonegoro.	81410	Jl. Diponegoro 38 Bojonegoro.	81419
		TJIPTADI. Ka Bag Bama.	- idem -	81410	Perumahan Rakyat Bojonegoro.	81084
2.	KANTOR: DINAS PERTANIAN RAKYAT PROP. DATI I JATIM EX KARESIDENAN BOJONEGORO.	SOEMASTO. Kepala Diperta Ex Karesidenan Bojonegoro.	Jl. Diponegoro 75 Bojonegoro.	81171	Jl. Teuku Umar 15 Bojonegoro.	81554
3.	KANTOR: DINAS PERINDUS-TRIAN DATI II KABUPATEN BOJONEGORO.	S J A H R I . Kepala Dinas Perindustrian Kab. Bojonegoro.	Jl. Trunojoyo 3 Bojonegoro.	81664	Jl. Raya 66 Desa- Mojo deso Kapas.	81 -
4.	KANTOR: DINAS PERINDUS-TRIAN PROP. DATI I JATIM DI BOJONEGORO.	AMINOELLAH, BSc. Kepala Dinas Perindustrian Ex Karesidenan Bojonegoro.	Jl. Trunojoyo 3. Bojonegoro.	81411	Jl. Trunojoyo 3 Bojonegoro.	81411
5.	KANTOR :DINAS PETERNAKAN SUB DAERAH BOJONEGORO.	Ir. PERMADI RASTIKO. Kepala Dinas Peternakan.	Jl. Basuki Rachmat No.1 Bojonegoro.	81172	Jl. Basuki Rachmat No.1 Bojonegoro.	81172
		M. SOEKARSONO. Bagian Peternakan.	- idem -	81172	Jl. MR. Soepratman No. 3 Bojonegoro	81436
		ADI BASUKI. Bag. Kesehatan Hewan.	- idem -	81172	Jl. MR. Soepratman Bojonegoro.	81436
					6. KANTOR: DINAS PERIKANAN.....	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	<u>KANTOR</u> : DINAS PERIKANAN DATI I JATIM WILAYAH Ex. Kares. BOJONEGORO.	<u>R. MOCH. HALIL.</u> Pembantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Prop. Dati I. Jatim Wily. Bojonegoro.	Jl. Kartini, 2 Bojonegoro.	1 81717	Jl. Kartini, 2 Bojonegoro.	1 81717
7.	<u>KANTOR</u> : DINAS PERIKANAN DATI I JATIM DRH KERJA BOJONEGORO.	<u>R A S I P A N .</u> Kepala Dinas Perikanan Daerah Kerja Bojonegoro.	Jl. Kartini, 2 Bojonegoro.	1 81717	Jl. Panglima Sudirman 67 Bojonegoro.	1 81 -
		<u>SOEKANDAR.</u> Kepala Urusan Adminis- trasi.	- idem -	1 81717	Jl. - idem -	1 81 -
		<u>S A L I M .</u> Kepala Urusan Paren - canaan.	- idem -	1 81717	Jl. Setiyo Budi GG. III / 5 Bojonegoro.	1 81 -
		<u>F A R K U N .</u> Kepala Urusan Pendi - dikan Penyuluhan.	- idem -	1 81717	Jl. Pasar Purwosari Kecamatan Purwosari.	1 81 -
8.	<u>KANTOR</u> : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO.	<u>Drs. KOESNANDAR.</u> Kepala Dinas Sosial.	Jl. Panglima Sudirman Bojonegoro.	81512	Jl. Rajawali 103 Bojonegoro.	1 81587
9.	<u>KANTOR</u> : PENDAPATAN DRH PROP. DATI I JATIM di BOJONEGORO.	<u>SISWANTO RAHARDJO, BA.</u> Kepala Kantor.	Jl. Teuku Umar Bojonegoro.	18 1 81550	Jl. Dr. Soetomo 154 Bojonegoro.	1 81467
10.	<u>KANTOR</u> : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP. DATI I JATIM WILAYAH BOJONEGORO. (D.L.A.J.R.).	<u>SI KOESTONO.</u> Kepala Wilayah.	Jl. Teuku Umar Bojonegoro.	1 81291	Jl. Teuku Umar 2 Bojonegoro.	1 81648

11. KANTOR : DINAS PERBURUHAN.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	<u>KANTOR:</u> DINAS PERBURU- HAN DATI I JATIM WILAYAH VI di BOJONEGORO.	<u>DJOKO SARDJONO.</u> Kepala Dinas Perburuh- an.	Jl. Teuku Umar 42 Bojonegoro.	81552	Jl. Teuku Umar 42 Bojonegoro.
12.	<u>KANTOR:</u> DEPOT LOGISTIK JATIM SUB DOLOG BOJONEGORO.	<u>GANDUNG ABDUL MURSYAT.</u> Kepala Sub Depot Logis- tik Bojonegoro.	Jl. Untung Suropati No. 10 Bojonegoro.	81232	Jl. Untung Suropati 10 Bojonegoro.
		<u>SOEMARDI.</u> Inspektur Pembantu.	- idem -	81232	Jl. Diponegoro Gg. Netral No. 58 Bojonegoro.
		<u>ROESMADJI.</u> Ka Sie Alur.	- idem -	81232	Jl. Gajahmada 16 Bojonegoro.
		<u>SUGENG SANTOSO.</u> Ka Sie Minku.	- idem -	81232	Jl. Panglima Sudirman No. 44 Bojonegoro.
13.	<u>KANTOR:</u> PERUM LISTRIK NEGARA (PLN) CABANG CEPU WILAYAH XIII RANTING BOJONEGORO.	<u>BS. SAJONO.</u> Kepala PLN.	Jl. Masjid 16 Bojonegoro.	81128	Jl. Masjid 16 Bojonegoro.
14.	<u>KANTOR:</u> DINAS PERKEBUNANI PROP. DATI I JA- TIM di BOJONEGORO.	<u>SI SAPTOADMODOJO</u> Penanggung Jawab.	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81526	Jl. Rajekwesi 13 Bojonegoro.
15.	<u>KANTOR:</u> PERUSAHAAN JAWA- TAH KERETA API (P.J.K.A.). Bojonegoro.	<u>F. SOEDARTO.</u> Kepala Stasiun.	Jl. Gajahmada 15 Bojonegoro.	81167	Jl. - Sementara di Mess Jl. Manginsidi Bojone- goro.
15.	<u>KANTOR:</u> PERUM POS & GIRO BOJONEGORO.	<u>Drs. ANIS RUSKANDAR, BC, Ap.</u> Kepala Kantor Pos & Giro.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81140	Jl. Trunojoyo 1 Bojonegoro.
17.	<u>KANTOR:</u> PERUSAHAAN NEGA- RA XIX PERKE- BUNAN TEMBAKAU BOJONEGORO.	<u>S O E G O N D O .</u> Pemimpin Kebun.	Jl. Trunojoyo 10 Bojonegoro.	81318	Jl. Masjid 015 Bojonegoro.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17. b.	<u>KANTOR:</u> PERUSAHAAN NEGARA XIX PERKEBUNAHAN TEMBAKAU BOJONEGORO.	<u>D A R S O H O .</u> Kepala Kanbor.	Jl. Trunojoyo 10 Bojonegoro.	81318	Jl. AKBP. M. Soeroko Bojonegoro.	81304
18.	<u>KANTOR:</u> PT " PERTANI " KESATUAN PEMASARAN BOJONEGORO.	<u>R. WIDODO BROTO SUTRASNO</u> Kepala PT " PERTANI " (PESERO).	Jl. Diponegoro 72 Bojonegoro.	81141	Jl. Diponegoro 74 Bojonegoro.	81311
		<u>SOEHARTO, MD</u> Wk. Kepala PT " PERTANI " (PESERO).	- idem -	81141	Jl. Diponegoro 76 Bojonegoro.	81 -
		<u>S O E P O Y O .</u> Kepala Bagian Pemasaran	- idem -	81141	Jl. Diponegoro 74 Bojonegoro.	81 -
		<u>F O O Z E N .</u> Kepala Bagian Administrasi, PT " PERTANI ".	- idem -	81141	Jl. Balongrejo 429 Desa Banjarejo Bojonegoro.	81 -
19.	<u>KANTOR:</u> PERUM PERHUTANI UNIT II JATIM, POLISI KHUSUS KEHUTAHAN BOJONEGORO.	<u>R. SARDJONO.</u> Dan Ton Polisi Hutan Mobil Bojonegoro.	Jl. Sawunggaling Bojonegoro.	81188	Jl. Sawunggaling Bojonegoro.	81344
20.	<u>KANTOR:</u> SENSUS & STATISTIK KAB. BOJONEGORO.	<u>ABDOEL KAMID, BA.</u> Kepala Kantor.	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81080	Jl. Pemuda Gg. Sutaji 6 Bojonegoro.	81 -
		<u>S A H A R .</u> Kepala Urusan Tehnis	- idem -	81080	Jl. Jendral Basuki Rachmat Gg. SDH Desa Sukorojo Bojonegoro.	81 -
		<u>S A G I J O N O .</u> Kepala Urusan Administrasi.	- idem -	81080	Jl. Mr. Supratman 3 A Bojonegoro.	81 -

21. KANTOR: DEP. PENERANGAN.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21	KANTOR: DEPARTEMEN PENERANGAN R. I KABUPATEN BOJONEGORO.	W I N A R S O . Kepala Dep. Penerangan PUPENMAS Kab. Bojonegoro	Jl. Pahlawan Bojonegoro. (DEPPEN KAB. BJN). Jl. Jendral Achmat Jani 5 Bojonegoro.	81413 81454	Jl. Teuku Umar Gg. Kepala Dasa Kadi - paten Bojonegoro.	81 -
22.	KANTOR: DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN WILAYAH PROP. JATIM, KABUPATEN BOJONEGORO.	MUKADI, BA. Kepala Kantor Dep. P & K.	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81580	Jl. Gajahmada 61 C Bojonegoro.	81 -
		INDIO LUKITO. Ka Sub Bag Tata Usaha.	- idem -	81105	Jl.	81 -
23.	KANTOR : DEPERTEMEN PD & K KABUPATEN BOJONEGORO.	MUKADI, BA Kepala Kantor Dep. PD & K.	Jl. STM. Sumbang Bojonegoro.	81257	Jl. Gajahmada 61 C Bojonegoro.	81 -
24.	KANTOR: DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, PERUM Pengeringan Tembakau Redriyeng Tembakau BOJONEGORO.	R. SOEDARMO. Dir. Utama.	Jl. Jendral. Basuki Rachmat 7 Bojonegoro.	81233/1	Jl. Jendral Basuki Rachmat 5 Bojonegoro.	81233
		SEDIYO OETOMO. Ka Bag Personalia.	- idem -	81675	- idem -	81675/III sesudah jam kantor.
		P. P. T. B. Bagian Umum. Ruang Dirut. Pabrik/Ruang Kantor.	- idem -	81675 81233/II 81675/1	- idem -	-
5.	K : DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KAB. BOJONEGORO.	P A R D J O N O . Kepala Kantor.	Jl. Trunojoyo 3 Bojonegoro.	81425	Jl. Teuku Umar 94 Bojonegoro.	81542

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26.	<u>KANTOR</u> : DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RAYON BOJONEGORO.	<u>S. WARSOPRASODJO.</u> Kepala Kantor.	Jl. Jendral Basuki Rachmat 3 Bojonegoro.	81491	Jl. Jendral Basuki Bachmat 3 Bojonegoro.	81491
27.	<u>KANTOR</u> : DIT. JEN. PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (DEPHAKER DAN TRANSMIGRASI) - BOJONEGORO.	<u>SOEBAGIYO, BA.</u> Kepala Kantor.	Jl. Panglima Sudirman 35 Bojonegoro.	81255	Jl. Panglima Sudirman 35 Bojonegoro.	81255
28.	<u>KANTOR</u> : DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. KANWIL VII DIT. JEND. BEA & CUKAI SURABAYA KANTOR CABANG TK. II BOJONEGORO.	<u>S. SISWANTO.</u> Kepala Kantor.	Jl. AKBP. M. SOEROKO 15 Bojonegoro.	81319	Jl. AKBP. M. Soeroko 15 Bojonegoro.	81418
29.	<u>KANTOR</u> : DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. KANWIL VII DIT. JEND. PAJAK JATIM. Inspeksi IPEDA Surabaya Kantor Dinas Luar Tk. I Bojonegoro.	<u>HUSNUL KABRI.</u> Kepala Kantor.	Jl. Teuku Umar 60 Bojonegoro.	81144	Jl. Teuku Umar 60 Bojonegoro.	81418
30.	<u>KANTOR</u> : DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. KANWIL DIT. JEND. ANGGARAN SURABAYA KANTOR KAS NEGARA BOJONEGORO.	<u>HARNOKO HS.</u> Kepala Kantor Kas Negara.	Jl. Panglima Sudirman 24 Bojonegoro.	81832	Jl. Panglima Sudirman 24 Bojonegoro.	81832
		<u>Drs. SOFYANI SAYOETI.</u> Kepala Seksi Peta Usaha	- idem -	81832	Jl. Dr. Soetomo 158 Bojonegoro.	81 -
		<u>Drs. SURBAINI ARBYAD.</u> Kepala Seksi Kas /- Bank/ Giro Pos.	- idem -	81832	Jl. Panglima Sudirman Gg. Buntu No. 32 Bojonegoro.	81 -

31. KANTOR: DEP. KEU. RI KANWIL VI
DIT. JEND. PAJAK.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KANTOR:	DEPARTEMEN KEU. R.I.KANWIL VI DIT. JEND.PAJAK JATIM KEPALA INSPEKSI PAJAK BOJONEGORO.	<u>Drs. SYAMSUDDIN H.</u> Kepala Inspeksi Pajak.	Jl.Teuku Umar 23 Bojonegoro.	81380	Jl.Trunojoyo 4 Bojonegoro.	81387
		<u>Drs. GUSTAF JAKSAM.</u> Kepala Seksi Umum.	- idem -	81900	Jl.Teuku Umar 23 (Komplek Perumahan Dinas Belakang Kantor).	81 -
		<u>WASIS SIDI, SH.</u> Kepala Seksi P.3.	- idem -	81855	- idem -	81 -
		<u>PRIYATNO, SH.</u> Kepala Seksi Penetapan II..	- idem -	81900	- idem -	81 -
		<u>R.J. HARIYANTO.</u> Kepala Seksi Penetapan I.	- idem -	81900	Jl.AKBP.H.Soeroko 7 Bojonegoro.	81553
		<u>Des.M.SUTADI.</u> Kepala Dinas Luar TK.I/- A.K.P.B.	- idem -	81855	Jl.Dr.Mahidin 19 Bojonegoro.	81468
		<u>ABDOEL AZIS, SH.</u> Kepala Seksi Keberatan.	- idem -	81855	Jl.Panglima Sudirman 38 Bojonegoro.	81 -
KANTOR:	JAWATAN PEGA - DAERAH PEMERIKSAAN BOJONEGORO.	<u>SOEKOTJO, BA.</u> Kepala Drh.Pemeriksaan Jawatan Pegadaian Bjn.	Jl.Kartini 17 Bojonegoro.	81185	Jl.Kartini 17 Bojonegoro.	81185
	JAWATAN PEGADAIAN BOJONEGORO.	<u>K A R M E N I .</u> Kepala Cab.Pegadaian Bojonegoro.	Jl.Iwan Bonjol 10 Bojonegoro.	81 -	Jl.Kartini 17 Bojonegoro.	81 -

34. KANTOR: DPU PROP.DAERAH TK.I..

34.	KANTOR: DPU PROP. DATI I JATIM DAERAH PE- NGAIRAN BOJONEGORO	Ir. ALI KOENTORO, DIP. HE. Kepala DPU Drh. Pengairan.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81143 620	Jl. Trunojoyo. Bojonegoro. m. Adh	8153 499 533
		S O E Y A N T O . Kepala Bagian Teknik DPU.	- idem -	81143	Jl.	81534
35.	KANTOR: DPU PROP. DATI I JATIM DAERAH BINA MARGA BOJONEGORO	S O E T I H O , BRE. Kepala DPU Drh. Bina Marga.	Jl. Panglima Sudirman Bojonegoro.	81189	Jl. Panglima Sudirman 20 Bojonegoro.	81622
		SOEBANDI , BRE. Kepala Bagian Teknik DPU Drh. Bina Marga.	Jl. Panglima Sudirman 22 Bojonegoro.	81551	Jl. AKBP. H. Saeroko 19 Bojonegoro.	81381
		NOHAMMAD ALIE. Kepala Bagian Tata Usaha DPU Drh. Bina Marga.	- idem -	81551	Jl. Teuku Umar 89 Bojonegoro.	81 -
		ABDOEL BASAR. Bendaharawan DPU Drh. Bina Marga.	- idem -	81551	Jl. Teuku Umar 89 Bojonegoro.	81 -
36.	KANTOR: DPU PROP. DATI I JATIM SEKSI BINA BINA MARGA BOJONEGORO	SOEDIARJO , BRE. Kepala DPU Seksi Bina Marga.	Jl. Trunojoyo 1 Bojonegoro.	81462	Jl. Imam Bonjol 1 A Bojonegoro.	81615
37.	KANTOR: DPU PROP. DATI I JATIM SEKSI PENGA- IRAN BOJONEGORO.	MATRADJI HEROEPRAJITNO. Kepala DPU Seksi Penga- iran Bojonegoro.	Jl. Trunojoyo Bojonegoro.	81330	Jl. Imam Bonjol 2 A Bojonegoro.	81451
38.	KANTOR: DPU DIT. JEN. PENGAIRAN SUB PROYEK BENGAWAN SALA HILIR BOJONEGORO.	Ir. ADI SARWOKO, DIP. HE. Pengawas Pemimpin.	Jl. Raya Bojonegoro- Babat (Kantor Sub Pro- yek Bengawan Sala - Hilir).	81670	Jl. Dr. Soetomo 15	81499
			Jl. Untung Suropati 16 Bojonegoro.	81668	-	
		Ir. SOEBROTO. Kepala Bagian Teknik.	- idem -	81670	Jl. Dr. Soetomo 14 Bojonegoro.	

- 9 -

2.	3.	4.	5.	6.	7.
BANK RAKYAT INDO- NESIA CABANG BOJONEGORO.	<u>S.E. HATAMIDJAJA.</u> Kepala Kantor Cab.BRI Bjn. Bojonegoro.	Jl.Pahlawan 2 Bojonegoro.	81364	Jl.Pahlawan 2 Bojonegoro.	81307
	<u>Drs. KUSBAN DIBYO SUSENO.</u> Wakil Kepala Kantor.	- idem -	81364	Jl.Diponegoro 15 Bojonegoro	81 -
	<u>DANIENDRO.</u> Credit Officer Kantor Gab. BRI Bojonegoro.,	- idem -	81364	Jl.Panglima Sudir- 50 Bojonegoro.	81 -
	<u>H. HARDIMAN.</u> Operation Officer Kantor Cab.BRI. Bojonegoro.	- idem -	81364	Jl.Sa Kauman Sela - tan 192 Bojonegoro.	81 -
40. KANTOR : BANK NEGARA INDO- NESIA - 1946 GAB. BOJONEGORO.	<u>S U U D .</u> Pemimpin BNI - 1946.	Jl.Panglima Smdir- man 21 Bojonegoro.	81846	Jl.Diponegoro 21 Bojonegoro.	81746
	<u>HOCH. FADLIL.</u> Wk.Pemimpin BNI-1946.	- idem -	81846	Jl.Untung Suropati 18 Bojonegoro..	81 -
41. KANTOR : DIREKTORAT JEND. PEMASYARAKATAN (Dep.Hak) BOJONEGORO.	<u>SOEDARDJI TOYO.</u> Pjs.Kepala Kantor Ditjen Pemasyarakatan merangkap Kepala L.P.Bojonegoro.	Jl.Diponegoro 78 Bojonegoro.	81107	Jl.Diponegoro 67-AI Bojonegoro.	81339
	<u>ACHMAD MASKOEN.</u> Kepala Sub Bag Tata Usaha.	- idem -	81107	Jl.MH.Tanrin Kauman Barat Tangkis RT.XI No.529 Bojonegoro.	81 -
	<u>SOEDIRDJAN.</u> Kepala Seksi Pembinaan Pemasyarakatan.				
	<u>MOEGIHARTO .</u> Pj.Kepala Seksi Pembinaan Bispa-	- idem -	81107	Gg. Buyuddalem Jl.Rider 13 B Bojonegoro.	81 -
	<u>M. A DAERAH TINGKAT</u> Kepala Seksi Pengelolaan	- idem -	81107	Jl.Diponegoro Gg. Sukar Nadin	81 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
42.	KANTOR : PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANG- KUAN HUTAN PARENGAN.	1. GOELARSO MARTOPRAJITNO. Administratur / KBKPH.	Jl. Teuku Umar 2 Bojonegoro.	81230	Jl. Teuku Umar 61 Bojonegoro.	81495
		1. Ir. RUSMADI. Ajun Administratur.	- idem -	81230	Jl. Sawungeling 4A. Bojonegoro.	81298
		1. MOCH. SALEH. Kepala Kantor.	- idem -	81230	Jl. Teuku Umar 63 Bojonegoro.	81667
		1. Ir. MAHMUD HANSYUR. Asper/KBKPH Malo.	Malu Bojonegoro.	-	Malu Bojonegoro.	-
		1. ADJID SOEDRADJID. Asper/KBKPH Montong.	Montong (KBKPH).	-	Montong Kab. Tuban.	-
		1. DJANI SOEDARMOLO. Asper/KBKPH Parengan se- latan.	KBKPH Parengan se- latan.	-	Parengan Kab. Tuban.	-
		1. SOEPARMAN, BSc. Asper/KBKPH Mulyoagung.	KBKPH Mulyoagung.	-	Mulyoagung Kecamatan Singgahan.	-
		1. S A E R A H . Asper/KBKPH Parengan Utara.	KBKPH Parengan Utara	±	Desa Ngawan Kecamatan Parengan Kab. Tuban.	-
		1. SOEKRITO DARNOSOEMITO. Asper/KBKPH Pungpungan.	KBKPH Pungpungan.	-	Brangkal Kab. Tuban.	-
					43. KANTOR : PERHUTANI BOJONE	

43.	KANTOR	KERON PERKOTA KPH BOJONEGORO.	<u>Dr. SINGADI.</u> Administrator Perum Perhutani KPH Bojonegoro.	Jl. Imam Bonjol Bojonegoro.	81302	Jl. Imam Bonjol Bojonegoro.	81 -
44.	KANTOR	DIT. JEN. BINA GUNA TENAGA KERJA KAB. BOJONEGORO.	<u>Drs. NARUADI.</u> Kepala Kantor Depag.	Jl. Panglima Sudirman 35 / 54 Bojonegoro.	81681	Jl. Gg. Barah Kadipaten 54 Bojonegoro.	81 -
45.	KANTOR	DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.	<u>Drs. I S M A I L.</u> Kepala Kantor Depag.	Jl. Panglima Sudirman 34 Bojonegoro.	81367	Jl. Diponegoro Bojonegoro.	81614
46.	KANTOR	GABUNGAN TELEPHON DAN TELEGRAF KAB. BOJONEGORO.	<u>SYAMSUL DARMO SYAMSUDDIN</u> Kepala Kantor.	Jl. Diponegoro Bojonegoro.	81800	Jl. Panglima Sudirman 4 Bojonegoro.-	81990
47.	KANTOR	KOPERASI KABUPATEN BOJONEGORO.	<u>BOEDIONO.</u> Kepala Kantor Koperasi.	Jl. Trunojoyo 3 Bojonegoro.	81524	Jl. Sebelah Masjid Kota Desa Kawah Bojonegoro.	81 -
48.	KANTOR	DPU CIPTA KARYA TENAGA KERJA BOJONEGORO.	<u>SUHARIYANTO</u> Kepala Kantor.	Jl. Trunojoyo 1 Bojonegoro.	81462	Jl. Dr. Setiya Budi Bojonegoro.	81 -
49.	KANTOR	PERENCANAAN HUTAN DAERAH BOJONEGORO.	<u>H A R D J I T O ,BA.</u> Kepala Kantor.	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81786	Jl. Pahlawan Bojonegoro.	81629
50.	KANTOR	RUHAH SAKIT UMUM BOJONEGORO.	<u>Dr. ADI HANDOYO SANTOSO</u> Kepala RSU Bojonegoro.	Jl. Dr. Wahidin 40 Bojonegoro.	81193	Jl. Dr. Wahidin 38 Bojonegoro.	81740

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
 WILAYAH/DAERAH TINGKAT II, SEKRETARIAT
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAN SEKRE-
 TARIAT PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 TINGKAT II

Surat Keputusan Menteri
 Dalam Negeri
 Nomor : 130 Tahun 1978.

